

Skripsi Amanda Dhea Sekharwardhani

by CEK PLAGIASI

Submission date: 12-Aug-2022 10:05AM (UTC+0900)

Submission ID: 1881378663

File name: Skripsi_Amanda_Dhea_Sekharwardhani.docx (278.23K)

Word count: 17131

Character count: 115245



UNIVERSITAS NASIONAL

**PENYELARASAN KEBIJAKAN INDONESIA DENGAN
ASEAN DALAM MELAWAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN: KASUS KELOMPOK NEGARA ISLAM
INDONESIA TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional (S.Sos)**

Amanda Dhea Sekharwardhani

NPM. 183112350750042

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

2022



UNIVERSITAS NASIONAL

**POLICY ALIGNMENT BETWEEN INDONESIA AND ASEAN
IN COMBATING VIOLENT EXTREMISM: THE CASE OF
THE INDONESIA ISLAMIC STATE GROUP IN 2021-2022**

THESIS

**Sumbitted to fulfill part of the requirements for obtaining a Bachelor Degree
of Social Science (S. Sos)**

Amanda Dhea Sekharwardhani

NPM. 183112350750042

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE

JAKARTA

2022

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa kita ucapkan atas dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENYELARASAN KEBIJAKAN INDONESIA DENGAN ASEAN DALAM MELAWAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN: KASUS KELOMPOK NEGARA ISLAM INDONESIA TAHUN 2021-2022"**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis ingin meminta maaf atas segala kekurangannya dengan kerendahan hati penulis.

Skripsi ini juga tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. El Amry Bernawi Putra, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.

2. Ibu Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.
3. Bapak Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum dan Akademik
4. Bapak Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Administrasi Umum, dan selaku Dosen Pembimbing yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, arahan, dan saran dalam mengerjakan skripsi penulis sejak awal penulisan skripsi hingga akhir penulisan skripsi. Terimakasih banyak bapak atas bimbingannya pak.
5. Ibu Dr. Irma Indrayani, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Nasional.
6. Bapak Alm. Dr. Zulkarnain, S.I.P., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik penulis yang sedari awal mengarahkan dan juga memberikan saran kepada penulis hingga tahapan skripsi ini.
7. Seluruh dosen pengajar FISIP UNAS, terimakasih bapak/ibu atas segala pengetahuan yang telah memberikan pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendididn di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Seluruh staf Prodi Hubungan Internasional di FISIP Universitas Nasional, khususnya untuk Mas Sugi yang senantiasa membantu penulis apabila mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Andhika Chrisnayudhanto dan Ibu Tri Dewi Widyastuti, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan kesabarannya yang luar biasa dalam kehidupan penulis. *Thank you*

Daddy and Mommy, penulis berharap dapat menjadi anak yang bisa dibanggakan. Serta, adik Penulis tercinta Adhitya Ranggawardhana, Aryasatya Priyambhada Chrisnayudhanto, Ardhito Narawangsa, yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis saat skripsi.

10. Untuk kawan-kawan di BNPT Deputy Bidang Kerjasama Internasional, Om Dimi, Tante Alfrida, Om Igor, Tante Hani, Kak Shinta, dan kawan-kawan di Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral, Direktorat Perangkat Hukum Internasional, dan Direktorat Kerjasama Bilateral, yang telah memberikan pelajaran, materi, dan data untuk skripsi penulis.
11. Teruntuk sahabatku sejak SMA hingga Kuliah, tempat berkeluh kesah, dan selalu *support* penulis selama ini dalam skripsi ini, Nurul Fita Nabilah, terima kasih fita sudah ada untuk penulis. Semoga *goals* dan cita-cita kita semua akan tercapai. *When the night is coming down on us, We will find a way through the dark!*
12. Teruntuk sahabat semasa kuliah Rama Arga Gunanto dan Tasya Maharani, yang telah menjadi teman-teman seperjuanganku dari pertama masuk kuliah hingga selesai. Semoga kalian sukses selalu dan tercapai cita-citanya.
13. Temanku, Desinta Febriany, yang menjadi teman penyemangatku dari awal hingga akhir mengerjakan skripsi dan selalu memberikan dukungan. Terima kasih sahabatku semoga skripsinya lancar. *Our best moment is yet to come!*
14. Kepada seluruh teman-teman hubungan internasional angkatan 2018 terimakasih banyak atas kebaikannya selama ini dan sukses untuk kita semua

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh pembaca.

Jakarta, Agustus 2022

Amanda Dhea Sekharwardhani

ABSTRAK

Nama/ NPM : Amanda Dhea Sekharwardhani

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul : Penyelarasan Kebijakan Indonesia dengan ASEAN dalam Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan: Kasus Kelompok Negara Islam Indonesia Tahun 2021-2022

Keywords : Ekstremisme Berbasis Kekerasan, Kebijakan, Indonesia, ASEAN, Terorisme

Isi : Asia Tenggara telah diakui sebagai kawasan yang memilikitantangan kekerasaninternal yang sangat kompleks salah satunya ekstremisme berbasis kekerasan. Kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan sering dikaitkan dengan jaringan radikalisme, gerakan kekerasan domestik, pemberontakan, separatisme hingga terorisme sehingga kejahatan ini memiliki urgensi untuk ditindak lanjuti dan dicegah. Maka dalam wilayah regional Membutuhkan Langkah koordinasi regional ASEAN dalam membuat strategi dan kebijakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Dari adanya langkah koordinasi regional, maka dibutuhkan setiap negara anggota untuk mengadopsi nilai-nilai dari kebijakan dan strategi yang telah dibuat agar bisa membuat rencana aksi nasional yang berfokus untuk mengamankan negara, indentifikasi kejahatannya, dan kontraterorisme. Dalam penelitian ini menggunakan konsep keamanan dan counter terrorism. Untuk menunjang hasil penelitian yang lebih komprehensif penulis menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya proses koordinasi dan penyelarasan ini dapat menurunkan radikalisme di wilayah Asia Tenggara. Kebijakan Indonesia ini dapat mencegah kelompok NII melakukan Tindakan kekerasan.

Referensi : 25 buku + 18 Jurnal + 3 Dokumen Pemerintah + 23 Internet

Pembimbing : Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si

ABSTRACT

Name/NPM : Amanda Dhea Sekharwardhani/183112350750042

Study Program : International Relations

Title : Policy Alignment between Indonesia and ASEAN in
Combating Violent Extremism: The Case of the Indonesian
Islamic State Group in 2021-2022

Keywords : Violent Extremism, Policy, Indonesia, ASEAN, Terrorism

Content : Southeast Asia has been recognized as a region that has very complex challenges of internal violence, one of which is violent extremism. Violent-based extremism crimes are often linked to networks of radicalism, domestic violent movements, rebellions, separatism to terrorism so that these crimes have urgency to be followed up and prevented. In the regional area, ASEAN regional coordination steps are needed in making strategies and policies for efforts to prevent and overcome violent extremism. From the regional coordination steps, it is necessary for each member country to adopt the values of the policies and strategies that have been made in order to create a national action plan that focuses on securing the country, identifying crimes, and counterterrorism. In this study using the concept of security and counter terrorism. To support the results of a more comprehensive research the author uses a qualitative approach research method. The result of this research is that this coordination and alignment process can reduce radicalism in the Southeast Asian region. This Indonesian policy can prevent the NII group from committing acts of violence.

Reference : 25 Books + 18 Journals + 3 Government Document + 25
Internet

Advisor : Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang Masalah	4
1.2 Rumusan Masalah	15
1.2.1 Identifikasi Masalah	15
1.2.2 Masalah Penelitian	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Kegunaan Penelitian	17
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
2.1 Penelitian Terdahulu	19
2.2 Kerangka Konseptual	23
2.2.1 Konsep Keamanan	23
2.2.2 Kebijakan Luar Negeri	28
2.3 Kerangka Penelitian	32
BAB III	33

METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Analisis Data	35
BAB IV	37
4.1 Dinamika Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Menuju pada Terorisme di Asia Tenggara	37
4.2 Ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju pada Terorisme di Asia Tenggara.....	44
4.2.1 Filipina	44
4.2.2 Thailand	50
4.2.3 Myanmar	55
4.2.4 Malaysia	57
4.2.5 Indonesia	61
4.3 Profil Kelompok NII (Negara Islam Indonesia)	68
4.4 Sejarah Kebijakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di ASEAN	71
4.4.1 Isi Kebijakan ASEAN Ekstremisme Kekerasan Tahun 2019-2025	73
4.5 Upaya Indonesia dalam Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju Pada Terorisme	75

4.5.1	Isi Kebijakan Indonesia Ekstremisme Kekerasan	78
BAB V		81
HASIL DAN PEMBAHASAN		81
5.1	Penyelarasan Kebijakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Indonesia dengan ASEAN	81
5.2	Tujuan Keamanan Dari Penyelarasan Kebijakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Indonesia dengan ASEAN.....	86
5.3	Penanggulangan NII dengan Kebijakan Indonesia dan ASEAN	89
BAB VI		90
DAFTAR PUSTAKA		93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Asia Tenggara telah diakui sebagai kawasan yang memiliki tantangan kekerasan internal yang sangat kompleks, kekerasan ini terdiri dari berbagai jenis kejahatan dan kejahatan ini sudah mampu melampaui batas nasional dari negara-negara Asia Tenggara.¹ Seiring dengan meningkat dan berkembangnya kejahatan maka diperlukan tanggapan dan kebijakan yang relevan dalam menanggapi isu kejahatan ini. Salah satu dari kejahatan yang mulai berkembang ialah violent extremism atau ekstremisme berbasis kekerasan.

Kejahatan ekstremisme berbasis ⁵ kekerasan adalah keyakinan dan tindakan orang-orang yang mendukung atau menggunakan kekerasan dalam pandangan ideologi, agama, dan politik radikal. Kejahatan yang terkait dengan ekstremisme berbasis kekerasan adalah radikalisme, terorisme, dan ekstremisme.² Ketiga kejahatan ini mempunyai efek yang sama, efek yang ditimbulkan dari kejahatan ini adalah terror bagi pihak yang menjadi target atas paham ekstrem. Namun ketiga kejahatan ini memiliki konsep yang berbeda.

Pertama, Radikal secara etimologis berasal dari Latin yang berarti akar atau basis. Sementara secara terminology radikal adalah aliran ideology tatanan politik

¹ Shashi Jayakumar, *Terrorism Radicalisation & Countering Violent Extremism*, New York: Routledge, 2019, hlm. 2-3

² Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia, WAHID Foundation, 2020, hlm. 3-4

yang menuntut adanya perubahan sosial dan politiki terhadap suatu negara.³ Pemaknaan radikal secara historis menyatakan bahwa radikal adalah tindakan atau gerakan partai yang mengadvokasi demokarasi dengan mempromosikan melalui cara-cara damai. Pemaknaan radikalisasi masa kini dikaitkan dengan keyakinan ekstremisme yang menghasilkan perilaku kekerasan.⁴ Makna radikalisasi juga berarti sebuah proses eskalasi dari aksi tanpa kekerasan hingga tindakan semakin keras seiring berkembangnya waktu.⁵ Dengan itu radikalisasi telah menjadi konsep yang mempunyai makna yang negatif karena dikaitkan dengan sikap dan tindakan kekerasan fisik.

Radikalisme disini juga adalah bentuk upaya untuk mengubah situasi sosial atau politik secara yang ekstrem. Perbedaan radikalisme dan ekstremisme adalah bahwa radikalisasi terjadi pada tahap awal dari terbentuknya proses ideologi ekstrem. Ekstremisme adalah tindakan yang dihasilkan dari sebuah proses radikalisasi. Sehingga radikalisasi berkembang menjadi ekstremisme.⁶

Lalu ekstremisme mempunyai deskripsi sendiri yaitu sebuah motivasi dari kejahatan terorisme, dimana ekstremisme terdiri dari keyakinan ideologi tentang bagaimana kewajiban untuk mengembalikan kesistem politik yang disarankan oleh norma-norma agama namun cara yang digunak melalui kekerasan. Aksi

³ Busman Edyar, "Religious Radicalism, Jihad and Terrorism Academic Journal of Islamic Studies", Vol. 2 No. 1, (2017), hlm. 2-3

⁴ Donatella della Porta, "Radicalization: A Relational Perspective", Annual Review of Political Science Vol. 21, (May 2018), hlm. 462

⁵ Lorenzo Bosi, Stefan Malthaner, "Political Violence", Oxford Handbook of Social Movements, (Desember 2014), hlm. 2

⁶ Muhammad Adnan, Anita Amaliyah, "Radicalism Vs Extremism: The Dilemma Of Islam And Politics In Indonesia", Jurnal Ilmu Sosial Vol. 20, (2021), hlm. 27

ekstremisme selalu dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang berjuang untuk merubah agenda politik yang ada ke agenda politik yang mereka anut. Maka disini ekstremisme adalah tindakan kekerasan dengan alasan politik yang didorong dengan dogma agama yang ekstrem.⁷ Ekstremisme berasal dari kata latin “ekstremus”, yang artinya adalah “pada akhirnya, ujung, atau tepi”. Ekstremisme dipicu atau dimotivasi oleh adanya kebencian atau permusuhan politik, ideologi, etnis, ras, atau agama, sehingga ekstremeisme ini menimbulkan permusnahan terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.⁸

Ekstremisme ini adalah ideologi yang menentang nilai-nilai dasar masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sehingga tindakan ekstremisme ini mendukung adanya supremasi ras, politik, sosial, ekonomi dan agama.⁹ Maka ekstremisme adalah perilaku dan keyakinan yang menyimpang dari norma-norma sosial yang ada, sehingga ekstremisme selalu dianggap sebagai motif dari tindakan terorisme.

Sedangkan terorisme menurut terminologisnya adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan akhirnya atau tujuan politik dengan menimbulkan rasa takut.¹⁰ Menurut Pasal 3 Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2010 tentang *Measures to Eliminate International Terrorism*, Terorisme adalah tindakan

⁷ Susilo Wibisono, Winnifred Louis, Jolanda Jetten, “A Multidimensional Analysis of Religious Extremism”, *Frontiers in Psychology* Vol. 10, (November, 2019), hlm.2-3

⁸ Diana B. Baisagatova dkk, “Correlation of concepts “extremism” and “terrorism” in countering the financing of terrorism and extremism”, *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION* VOL. 11, NO. 13, (2016), hlm. 5.905-5.906

⁹ Adnan, *Op.Cit.* Hlm. 28-30

¹⁰ Fitri Wahyuni, “Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, no. 2 (July, 2019), hlm. 198

criminal yang dapat dimaksudkan kegiatan ⁵ untuk memprovokasi keadaan terror di masyarakat umum, sekelompok orang atau individu dengan tujuan politik dalam keadaan apapun tidak dapat dibenarkan, dengan berbagai pertimbangan politik, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau sifat lain agar bisa membenarkan tindakannya.¹¹ Namun setiap negara mengadopsi definisi terorisme masing-masing yang ditetapkan menurut hukum dan keadaan dari negara itu sendiri. Beragamnya definisi terorisme ini dikarenakan evolusi dari konsep terorisme itu sendiri agar bisa membedakan terorisme dari peperangan tradisional hingga fenomena konflik bersenjata.

Adapun dari organisasi regional seperti Uni Eropa mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan yang disengaja yang dapat merusak suatu negara atau organisasi Internasional, berkomitmen dengan tujuan untuk mengintimidasi populasi, menghancurkan politik, konstitusional, struktur ekonomi hingga sosial dengan cara serangan terhadap kehidupan seseorang, serangan terhadap fisik seseorang, penculikan, penyanderaan, penyitaan pesawat atau kapal, kepemilikan atau pengangkutan senjata atau bahan peledak.¹²

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) disini belum memiliki definisi Terorisme yang pasti dikarenakan masih menggunakan definisi dari negara barat dan menggunakan definisi dari PBB. Namun negara-negara anggota ASEAN sudah mempunyai definisi sendiri untuk kejahatan terorisme. Seperti Filipina

¹¹ Negative effects of terrorism on the enjoyment of human rights: Study of the Human Rights Council Advisory Committee, United Nation Human Rights Council, 2020, hlm. 3-4

¹² *Ibid*

mendefinisikan terorisme didalam *Memorandum Order No.121* dalam Kebijakan Pemerintah Tentang Terorisme, Terutama pada Situasi Penyanderaan, “penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau alat pemusnah secara terencana yang dilakukan terhadap warga sipil atau non-kombatan yang tidak bersalah, atau terhadap property sipil dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan ketakutan yang dibantu dengan memeras, memaksa, mengintimidasi atau menyebabkan individu dan kelompok mengubah perilaku mereka.”¹³

Indonesia juga telah membuat definisinya sendiri yaitu pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang sifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”¹⁴

Dengan beberapa definisi tersebut, terorisme adalah penggunaan ancaman kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil untuk mengintimidasi publik agar mencapai tujuan politik, agama, atau ideologi yang dipercaya. Orang yang melakukan kejahatan ini disebut dengan teroris tindakan yang dilakukan akan selalu

¹³ Memorandum Order No. 121 years 2020 on Terrorism Particularly on Hostage-Taking , <https://www.officialgazette.gov.ph/2000/10/31/memorandum-order-no-121-s-2000/> diakses pada 16 November 2021

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 1

menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Maka orang yang melakukan kejahatan ini adalah aktor non-negara dan melakukan kejahatan dengan menggunakan kekerasan.

Ancaman adanya individu dan kelompok-kelompok radikal dan ekstremis ke dalam aksi terror semakin banyak di Asia Tenggara. Masuknya ideologi dan pemahaman radikal dan ekstremis berawal dari kelompok *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang berusaha membangun daerah operasional baru, ini ditandai dengan adanya penunjukan pemimpin baru yaitu Abu Sayyaf atau Isnilon Hapilton di Filipina pada tahun 2016. Kelompok ini disebut dengan nama Wilayah, Wilayah ini menjadi basis militan di Asia Tenggara.¹⁶ Lain halnya dengan kelompok dan individu radikal, radikalisme sudah lama ada di Asia Tenggara. Gerakan separatis kekerasan berbasis di Asia Tenggara sudah ada dalam 30 tahun terakhir. Salah satu ancaman terbesarnya ada di Indonesia dan menyebabkan ratusan korban jiwa.¹⁷

Menurut Global Terrorism Index Asia Tenggara memiliki skala teroris tinggi, salah satu negara dari Asia Tenggara masuk kedalam 10 negara yang berdampak paling tinggi di dunia yaitu Filipina.¹⁸ Filipina menjadi negara peringkat ke 10 dengan skor *Global Terrorism Index* 7.099. Kedua adalah negara Thailand dengan

¹⁵ Wahyuni, *Op.Cit*, hlm.

¹⁶ Nila Febri Wilujeng, "EXAMINING ASEAN OUR EYES DEALING WITH REGIONAL CONTEXT IN COUNTER TERRORISM, RADICALISM, AND VIOLENT EXTREMISM", *International Journal of Social Sciences* Vol. 6 Issue 1, hlm. 268

¹⁷ Congressional Research Service. (2016). *Terrorism in Southeast Asia*. https://www.everycrsreport.com/files/20170505_R44501_355e3437898708ad42305150ba1a54c2ebe32c54.pdf diakses pada 16 November 2021

¹⁸ The Institute for Economics & Peace, *Global Terrorism Index 2020: Measuring The Impact of Terrorism*, Institute for Economic & Peace, hlm. 28

skor 5.783, negara ketiga ada Myanmar dengan skor 5.543, dan ke-empat ada Indonesia dengan skor 4.649.¹⁹ Menurut laporan Global Terrorism Index juga bahwa ekstremisme agama menjadi faktor pendorong utama adanya serangan teroris di beberapa negara di dunia termasuk di dalam negara-negara Asia Tenggara.

Dengan meningkatnya jumlah serangan dan peristiwa terorisme dalam negara Asia Tenggara maka perlu dukungan dari pihak lain untuk mengambil tindakan koordinasi agar bisa mencegah dan mengatasi isu ini. Kebutuhan membuat kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebudayaan dan faktor lokal dari negara Asia Tenggara menjadi salah satu tantangan besar. Faktor ini mencakup adanya konflik dalam negara, struktur multi-etnis, dan kehadiran gerakan teroris internasional. Maka perlu adanya tanggapan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan ini.

Beranjak dari *United Nations General Assembly, Fifth Review of the Global Counter-Terrorism Strategy*, mengadopsi konsensus resolusi A / RES / 70/291 untuk memperkuat upaya bersama dalam memerangi terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam resolusi ini *United Nations General Assembly* merekomendasikan agar negara-negara anggota untuk mengembangkan rencana aksi nasional dan regional mencegah ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan konteks lokal yang berlaku dari negara tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ ASEAN PLAN OF ACTION TO PREVENT AND COUNTER THE RISE OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM (2018 – 2025). <https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf> . Diakses pada 17 November 2021

Ancaman-ancaman non-tradisional telah bergeser dari skala domestik ke skala regional, sehingga membutuhkan respons dan tindakan melalui kerja sama antar negara-negara di regional. Salah satunya dalam ASEAN, organisasi regional ini memiliki strategi dan kebijakannya sendiri dalam menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan. ASEAN bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi kebijakan kontra-terorisme antar negara di Asia Tenggara. Mempunyai dasar hukum yang sama dan relevan dengan seiring berkembangnya berbagai ancaman ekstremisme berbasis kekerasan ini akan meningkatkan kerjasama, keamanan regional dan nasional.²¹

ASEAN membuat rencana aksinya yang disebut The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018 – 2025). Rencana aksi sudah dibuat ini untuk menindaklanjuti ¹ *Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2017)*.²² Rencana aksi ini dibuat sebagai *blueprint* untuk diterapkan dan diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam membuat rencana aksi nasional dan basis hukum dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan sesuai dengan budaya dan faktor-faktor lokal dari negara tersebut.²³

Indonesia salah satunya sudah mengadopsi nilai-nilai dari rencana aksi ASEAN ke dalam Rencana Aksi Nasionalnya. Indonesia mempunyai sejarah yang panjang dengan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Politik ekstremisme

²¹ ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism, ASEAN, hlm. 9

²² ASEAN PLAN OF ACTION TO PREVENT AND COUNTER THE RISE OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM (2018 – 2025), Op. Cit

²³ Ibid

berbasis kekerasan telah muncul sejak Presiden Soeharto dipaksa mundur dari kekuasaannya pada tahun 1998. Tidak ada kontrol aktivitas politik yang ketat melahirkan banyak pemikiran Islam ekstremis dan radikal untuk mengambil otoritas negara Indonesia dan mengubahnya ke negara Islam.²⁴

Menurut Public Virtue Research Institute kasus terorisme di Indonesia berupa ledakan bom sudah ada sejak tahun 2000 dengan adanya ledakan bom di Kedubes Filipina. Pada 2002 ada ledakan Bom Bali I yang memakan korban jiwa 202 orang, dimana mayoritas korban jiwa merupakan warga negara Australia. Lalu pada tahun 2003 ada serangan bom JW Mariot dengan korban jiwa 12 orang meninggal dan 150 orang luka-luka. Bom Bali ke II terjadi kembali pada tahun 2005 dengan 23 korban tewas dan 122 korban luka. Peristiwa selanjutnya pada tahun 2009 ada Bom di Ritz Carlton. Pada tahun 2011 ada pengeboman Masjid Az-Dzikra di Cirebon. Lalu pada 2016 terjadi peristiwa Bom di Sarinah Jakarta dan diikuti dengan Bom Mapolresta Solo, Bom Kampung Melayu pada tahun 2017 dan Bom Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018.²⁵ Kasus serangan teroris di Indonesia ini Sebagian besar dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris yang terkait dengan Jamaah Jaringan Islamiah dan Al-Qaeda.²⁶

Kelompok radikal dan ekstremis juga sudah berkembang di Indonesia, kelompok ini didominasi oleh kelompok Islam Ekstremis yang dimana menggunakan agama sebagai alasan untuk membenarkan kekerasan agar dapat mencapai atau mengejar

²⁴ Angel M. Rabasa, *The Muslim World After 9/11*, Pittsburgh: Rand Corporation, 2004.

²⁵ CNN Indonesia. "Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir". 28 Maret 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>. Diakses pada 18 November 2021

²⁶ Ibid

tujuan politik. Ada 18 kelompok radikal Indonesia ini bergabung dan disumpah oleh kelompok milisi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan 3 diantaranya hanya mendukung ideologi dari ISIS.²⁷ Kelompok ini diantaranya Mujahideen Indonesia Barat, Mujahideen Indonesia Timur, Jamaah Tawhid Wal Jihad, Forum Aktivis Syariah Islam, Jamaah Ansharut Daulah, Gerakan Reformasi Islam. Lalu 3 kelompok yang mendukung ISIS ialah RING Banten, Jamaah Ansharut Tauhid, Halawi Makmun Group.²⁸ Kelompok-kelompok ini menyebarkan propaganda ISIS yang dilakukannya dengan menggunakan internet. Strategi ini dipakai agar dapat merekrut anggota-anggota baru dari kalangan ekstremis, yang pada akhirnya menjadi kelompok ekstremis berbasis kekerasan.

Salah satu contoh kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah Negara Islam Indonesia (NII), kelompok ini muncul dari kelompok pecahan darul Islam pimpinan S.M. Kartosuwiryo. NII mendeklarasikan pendirian Negara Islam Indonesia pada masa revolusi Indonesia, yang dimana pada tahun 2000-an mulai diketahui adanya eksploitasi dalam pola perekrutan dan aktivitasnya. Dalam proses perekrutan adanya motif-motif ideologi pendirian negara Islam dan peningkatan ekonomi bagi kalangan yang tertinggal atau dibawah.²⁹ Pada tahun 2022 kelompok ini ditetapkan sebagai kelompok jaringan teroris menurut Direktorat Pencegahan Badan Nasional

²⁷ Faiq Hidayat. "Ini 16 kelompok radikal Indonesia yang dibai'at pemimpin ISIS". merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-16-kelompok-radikal-indonesia-yang-dibaiat-pemimpin-isis.html> Diakses pada 18 November 2021

²⁸ Ibid

²⁹ The Habibie Center, Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia, hlm 26, <http://www.habibiecenter.or.id/img/publication/41d51936208e8c45854498ab7f4e39d3.pdf>

Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, dimana ia menyebutkan bahwa keberadaan NII memiliki ideologi yang bertentangan Pancasila, berpotensi melakukan kekerasan dan terror, NII juga mempunyai visi untuk mendirikan negara syariat Islam di Indonesia.³⁰

Munculnya kelompok-kelompok ini berupaya untuk mengubah tatanan yang sudah ada dengan cara memakai kekerasan. Ancaman ini akan mengancam kedaulatan dan keamanan negara dan masyarakat didalamnya. Sehingga dengan melihat faktor ini maka urgensinya membuat kebijakan dan rencana selanjutnya sangat penting agar dapat mendirikan keamanan, kesejahteraan rakyat dan perdamaian negara dan regionalnya.

Indonesia menjadi negara yang mempunyai sejarah yang panjang ini akhirnya membuat rencana aksi nasionalnya sendiri dengan nilai-nilai yang diadopsi dari rencana aksi ASEAN. Rencana Aksi Nasional Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme berisi strategi nasional yang mencakup kerangka kerja untuk pemerintah Indonesia dalam tingkat nasional dan Internasional. Rencana Aksi Nasional Indonesia juga berisi kerangka kerja kebijakan dalam mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang menyoroti bagaimana menggunakan pendekatan keamanan non-tradisional.

⁷ Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan harus memiliki strategi, kebijakan, dan koordinasi agar bisa mencapai keamanan

³⁰ Wardah, F, BNPT: NII Induk Semua Gerakan Terorisme di Indonesia, 10 Maret 2022, diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-nii-induk-semua-gerakan-terorisme-di-indonesia/6522808.html>

nasional dan regional. Mengingat bahwa kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan ini memiliki jaringan internasionalnya, maka langkah yang tepat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan adalah dengan melakukan langkah koordinasi skala regional dan masing masing negara di kawasan regional membuat rencana aksi nasionalnya. Pendekatan nasional untuk membuat rencana aksinya ini berfokus untuk mengamankan negara, indentifikasi kejahatannya, dan kontraterorisme.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan sering dikaitkan dengan jaringan radikalisme, gerakan kekerasan domestik, pemberontakan, separatisme hingga terorisme sehingga kejahatan ini memiliki urgensi untuk ditindak lanjuti dan dicegah. Ancaman yang disebabkan oleh kejahatan ini akan berdampak pada keamanan nasional hingga regional. Maka identifikasi masalah yang dapat ditarik ialah:

1. Membutuhkan langkah koordinasi regional ASEAN dalam membuat strategi dan kebijakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan.
2. Dari adanya langkah koordinasi regional, maka dibutuhkan setiap negara anggota untuk mengadopsi nilai-nilai dari kebijakan dan strategi yang telah dibuat agar bisa membuat rencana aksi nasional yang berfokus untuk mengamankan negara, indentifikasi kejahatannya, dan kontraterorisme.
3. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN akhirnya membuat rencana aksi nasional dari nilai-nilai yang telah dibuat oleh ASEAN

1.2.2 Masalah Penelitian

Untuk menspesifikasikan pembahasan, maka penulis mengambil masalah pokok penelitian dengan memfokuskan penelitian terhadap bagaimana kebijakan rencana aksi nasional Indonesia dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan keamanan nasional hingga regional dari ancaman kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan. Dengan mengadopsi dari nilai-nilai rencana aksi ASEAN, kebijakan rencana aksi Indonesia bertujuan untuk mencegah dan mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar dan norma-norma internasional, menyerukan upaya komprehensif dan kolektif untuk mencegah dan memerangi ekstremisme kekerasan dan terorisme. Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan sebagai berikut, **“Bagaimana kebijakan Indonesia dalam melawan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai langkah keamanan di kawasan ASEAN?”** dan **“Bagaimana NII dapat ditanggulangi dengan menggunakan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-PE) Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Pertama untuk dapat memberikan informasi tentang motivasi dan tujuan dari kelompok ekstremisme berbasis kekerasan dan kelompok teroris
2. Kedua untuk dapat melihat bagaimana upaya ASEAN dan negara anggotanya dalam mengatasi (1) kejahatan ekstremisme berbasis

- kekerasan, (2) mengurangi daya tarik dari ideologi radikal dan ekstremis,
(3) perbedaan latar belakang negara dalam membuat kebijakan CVE
3. Ketiga, untuk mengembangkan studi dan strategi keamanan non-tradisional dalam menanggapi isu ekstremisme berbasis kekerasan

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan dan kemampuan peneliti dalam Menyusun skripsi di bidang hubungan internasional
2. Memperkaya dan mengetahui lebih banyak tentang literatur dan skala hubungan Internasional
3. Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian kegunaan penelitian, dan sistematika dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Lalu membahas konsep dan teori yang dipakai dalam penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang dipakai dan teknik pengambilan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil dan temuan dari penelitian ini, seperti membahas perkembangan kejahatan Violent Extremism di Asia Tenggara, kerjasama dan koordinasi dari regional ASEAN dalam Counter Violent Extremism, menganalisis isi ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018-2025), menganalisis isi National Action Plan Indonesia yaitu Peraturan Presiden Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (2020-2024), dan bagaimana keterkaitan dengan teori dan konsep.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi mengenai kesimpulan dan inti dari hasil penelitian. Serta Saran ditujukan untuk pemerintah Indonesia dan ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar buku, jurnal, literature, dan referensi terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memakai dua penelitian terdahulu sebagai rujukan peneliti. Dua penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 2.1

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Danny Dwi Wulandari (2019)	Analysis of The Indonesian Government Initiative of The National Action Plan on Counter Violent Extremism that Lead to Terrorism	Dalam jurnal ini membahas bagaimana perkembangan terorisme di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Meningkatnya penyebaran terorisme dan terorisme menjadi salah satu aksi yang masuk kedalam ekstremisme berbasis kekerasan menyebabkan adanya urgensi dari tingkat regional dan nasional untuk membuat langkah strategis dalam mencegah dan menanggulangi. Lalu jurnal ini menjelaskan bagaimana	Perbedaan jurnal ini dan proposal penelitian ini ialah dimana Jurnal ini hanya berfokus pada Indonesia sebagai negara dalam membuat kebijakan dan rencana aksi nasionalnya untuk mempertahankan wilayahnya. Dimana proposal ini akan meneliti bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam membuat rencana aksi nasionalnya akan berpengaruh dalam mengamankan wilayah Asia Tenggara dan nasionalnya dari ancaman kejahatan ekstremisme

			Indonesia membuat National Action Plan berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh PBB dan ASEAN. Penerbitan National Action Plan ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum dan mendukung peraturan dalam penanganan ekstremisme berbasis kekerasan dan mengatasi koordinasi kelembagaan antar kementerian lembaga dan masyarakat sipil. Indonesia sudah mempunyai hukum dalam upaya pemberantasan terorisme namun dalam National Action Plan ini lebih menjelaskan kembali kerangka penegakan hukum dan menggunakan soft approach untuk meminimalkan tindakan terorisme dan radikalisasi.	berbasis kekerasan
--	--	--	---	---------------------------

2	1. Nila Febri Wilujeng 2. Yoedhi Swastanto 3. Thomas Gabriel Joostensz (2021)	COUNTER-TERRORISM COOPERATION IN THE ASEAN REGIONAL FORUM (ARF) FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIA DEFENSE DIPLOMACY	Dalam jurnal ini membahas bagaimana terorisme tidak hanya dapat membahayakan dalam negara namun juga berpengaruh dalam regional, pengaruh bahayanya terorisme ini secara langsung akan berakibatkan kelangsungan hidup ASEAN sebagai organisasi regional, keamanan, perdamaian, ekonomi, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh oleh tinjauan literatur dan wawancara. Pada jurnal ini juga membahas bagaimana kontra-terorisme adalah kombinasi dari public dan kebijakan internasional yang bertujuan untuk dapat	Perbedaan dalam jurnal ini dan proposal penelitian adalah dimana jurnal ini membahas bagaimana ASEAN membangun strategi dan kebijakan untuk kontra-terorisme. Dimana dalam proposal ini membahas tidak hanya kejahatan terorisme saja namun kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan yang meliputi ekstremisme, radikal, dan terorisme.
---	--	--	---	--

			membatasi kegiatan terorisme dan ideologi radikal dan ekstremis. Peningkatan signifikan kejahatan terorisme akhirnya melahirkan urgensi dalam membuat kebijakan kontra-terorisme, maka ASEAN melakukan kerjasama untuk membuat kebijakan dan membuat standar bersama agar bisa membuat tanggung jawab antar antar negara anggota. Salah satu negara anggota ASEAN yang melakukan diplomasi pertahanan ialah Indonesia, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai multilateral ASEAN dan membantu melembagakan standar regional dalam bidang keamanan.	
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan tentang antar konsep satu dengan konsep lainnya agar dapat memberikan suatu gambaran dan asumsi dengan variable-variabel yang diteliti. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan dan menganalisa keterkaitan isu dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sehingga kerangka konseptual ini berguna untuk mendukung penelitian agar terarah.

2.2.1 Konsep Keamanan

Konsep keamanan menurut etimologisnya berasal dari bahasa latin "securus" yang artinya bebas dari bahaya dan ketakutan. Namun berbagai literatur HI beragumen bahwa konsep keamanan itu sendiri didominasi oleh pandangan realisme tentang keamanan. Dimana pendekatan yang dipakai ialah pendekatan tradisional yang menyatakan bahwa konsep keamanan itu sendiri ialah kondisi yang terbebas dari ancaman militer dan bagaimana kemampuan suatu negara untuk melindungi negara-bangsa dari serangan militer yang berasal dari ancaman lingkungan eksternal.³¹ Seperti Hobbes, Machiavelli dan Rousseau cenderung menggambarkan bahwa adanya keadaan pesimistis dalam keamanan dan kedaulatan negara. Sistem internasional dipandang sebagai sebuah arena yang digunakan oleh negara-negara dalam mencapai keamanan mereka sendiri. Hubungan antar negara selalu dipandang

³¹ Anak Perwita, "Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia", diakses pada 19 November 2021, https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sebagai selalu perjuangan kekuasaan dan negara akan selalu berusaha mengambil keuntungan dari satu sama lain³².

Hanya negara yang dipandang sebagai aktor kesatuan dan entitas rasional. Kepentingan dan kebijakan nasional dari sebuah negara didorong akan adanya keinginan atau kekuasaan absolut.³³ Negara akan mencapai kekuasaan jika mereka bersaing untuk kepentingan nasionalnya mereka sendiri. Dalam hal ini maka kekuatan militer yang dapat menjamin kepentingan dan menjaga keamanan dari adanya ancaman angkatan bersenjata.³⁴ Sehingga keamanan dipandang sebagai perlindungan terhadap invansi militer dan ancaman Angkatan bersenjata dari negara lain.

Pandangan liberalis sedikit berbeda, tetapi menerima asumsi realis bahwa negara beroperasi dalam lingkungan yang anarkis dan negara akan berperilaku dengan mementingkan diri sendiri. Namun liberalis berpendapat bahwa politik internasional dan konflik tidak selalu dengan kekerasan dan kekuatan militer. Negara tidak perlu selalu berprasangka buruk terhadap negara lain, namun negara dapat mengandalkan kerjasama timbal balik untuk mengatasi masalah global. Selain itu perbedaan liberalis dan realis terlihat bagaimana pandangan liberal dalam aktor internasional, yang dimana liberalis mengakui adanya aktor selain negara

³² John Baylis, *The Concept of Security in International Relations*, Berlin: Springer, 2008, https://doi.org/10.1007/978-3-540-75977-5_37

³³ Marcos Degaut, *What is Security?*, diakses pada 20 November 2021, https://www.researchgate.net/publication/310495076_What_is_Security

³⁴ Degaut, *Ibid*

seperti organisasi antar pemerintah, perusahaan transnasional, hingga kelompok kepentingan lainnya.³⁵

Menurut pandangan Barry Buzan bahwa negara akan melakukan persiapan dan menjaga keamanannya dalam sistem internasional, negara akan mempertimbangkan kepentingan mereka dan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangganya untuk membuat kebijakan keamanan negaranya. Maka dari sini negara mempunyai pemahaman bahwa sekuritas nasional saling bergantung dan kebijakan keamanan tidak hanya dilakukan dan direferensikan oleh negara sendiri namun harus bersama-sama negara lain.³⁶

Maka dari sini sudah terlihat adanya perubahan secara pandangan tentang konsep keamanan. Seiring dengan berakhirnya perang dingin, pandangan terhadap keamanan dan ancamannya berbeda karena adanya pengaruh dari globalisasi. Pada masa kontemporer seperti sekarang membawa resiko ancaman model baru seperti global terorisme, sistem moneter global, pencemaran lingkungan dan pemanasan global, hingga bahaya nuklir. Ancaman baru ini berada di luar ancaman keamanan tradisional, ancaman ini disebut sebagai keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional ini mengancam keamanan pada tingkat secara global yang dipandang hanya dengan kerjasama dan perkembangan komunitas global yang dapat mencegah dan menanggulangnya.³⁷

³⁵ Baylis, Loc. Cit

³⁶ Barry Buzan, "People, States and Fear : The National Security Problem in International Relations", Michigan: Wheatsheaf Books, 1983, Hlm. 208

³⁷ *Ibid*

Studi keamanan tradisional melihat suatu keamanan melalui lensa keamanan nasional seperti yang sudah dijelaskan diatas. Keamanan tradisional memfokuskan pada meningkatkan keamanan dan melindungi negaranya dari negara-negara lain.³⁸ Studi keamanan non-tradisional mulai berkembang setelah perang dingin berakhir, dalam studi keamanan non-tradisional memperluas pembahasan dan ruang lingkup dari studi keamanan tradisional yang sempit karena masih membahas seputar ancaman militer saja.

Ancaman yang di timbulkan dalam keamanan non-tradisional ini didefinisikan sebagai tantangan terhadap kelangsungan hidup masyarakat, kesejahteraan yang dapat muncul dari ancaman non-militer. Ancaman ini meliputi perubahan iklim, penyakit menular, bencana alam, kekurangan makanan, human trafficking, perdagangan narkoba, terorisme.³⁹ Ancaman-ancaman ini memerlukan pendekatan multilateral dan kerjasama negara-negara dalam satu kawasan atau regional seperti Uni Eropa. Regionalisme ini dilakukan agar negara dalam satu kawasan bisa bertindak bersama dan melakukan langkah koordinasi untuk menanggulangi dan mencegah ancaman keamanan non-tradisional.⁴⁰

2.2.1.1 Konsep Keamanan Komunitas

Konsep komunitas keamanan adalah upaya untuk menemukan solusi atas keadaan ketidakamanan negara di kawasan internasional. Dimana konsep komunitas

³⁸ Nihlas PS, "Non-Traditional Security Threat and National Security", *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* Volume 07, Issue 07, 2020, hlm. 5.899-5.900

³⁹ Mely Caballero Anthony, Ralf Emmers, Amitav Acharya, *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, London: Routledge, 2009

⁴⁰ Zarina Othman, "Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia", *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 4, No. 2, 2013, hlm. 151-152

keamanan bertujuan untuk memberikan keamanan kolektif bagi anggota-anggota suatu wilayah atau regional. Pandangan yang dipakai ialah pandangan dari Emanuel Adler dan Michael Barnett yang dimana menurut pandangan mereka konsep keamanan komunitas ini ialah komunitas dari negara-negara yang berdaulat yang setuju dengan adanya berbagai ancaman modern dan tentang politik, ekonomi sosial, nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum dan reformasi ekonomi. Komunitas ini dapat memberikan keamanan kolektif melalui adanya proses kerjasama antar negara anggota dengan dasar nilai dan identitas bersama.⁴¹

Dalam konsep ini, identitas merupakan elemen yang penting dalam keamanan komunitas. Adanya identitas dan norma-norma yang sama menjadikan kerjasama keamanan dapat berjalan dengan efektif. Maka dalam konsep ini, para anggota negara akan bergantung pada komunikasi, wacana dan interpretasi untuk menyelesaikan sebuah isu.⁴² Komitmen yang dibangun ini, bertujuan agar kerjasama menjadi lancar dan mencegah terjadinya ancaman-ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, tidak hanya melalui kontrak kerjasama melainkan dapat melalui identitas bersama.

Menurut pandangan neo-liberal institusionalisme dalam keamanan komunitas adalah bagaimana negara membangun institusi untuk mendorong adanya kerjasama dan untuk mencapai kepentingan bersama dalam mempertahankan negaranya dan kelangsungan hidup. Lalu dijelaskan bahwa negara-negara akan berkomitmen

⁴¹ E. Adler, M. Barnett, *Security Communities*, Cambridge University Press, 1998

⁴² Hasan ULUSOY, "Revisiting Security Communities After The Cold War: The Constructivist Perspective", *Jurnal International Affairs* Volume 8, Issue 3, 2003, hlm. 4-5

untuk menggunakan institusi dengan berdasarkan identitas bersama dan dengan interaksi antar negara bagian serta transnasional. Komunitas keamanan bertujuan untuk adanya perubahan damai melalui pelebagaan identifikasi bersama, nilai-nilai transnasional, dan memiliki norma-norma sendiri agar mencapai tujuan bersama.⁴³

2.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri adalah tindakan atau sebuah strategi yang dapat digunakan satu negara dalam berinteraksi dengan negara lain agar dapat mencapai kepentingan negaranya. Kebijakan Luar Negeri menurut Webber dan Smith ialah sebuah kebijakan yang didalamnya terdiri upaya-upaya negara dalam mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan dan tindakan dimana semua ini dilakukan oleh pemerintah yang mengambil andil dalam bertindak dengan lingkungan eksternal.⁴⁴ Menurut pendapat lainnya seperti Kegley dan Wittkopf bahwa kebijakan luar negeri adalah kebijakan pemerinta yang berwenang dalam lingkungan internasional yang didasari kepentingan dan tujuan nasionalnya.⁴⁵

Selain itu, konsep dari kebijakan luar negeri ini menekankan pada tindakan eksternal dari pemerintah dalam ruang lingkup internasional. Dimana ini kebijakan luar negeri ini memfokuskan dalam proses pengambilan keputusan, menekankan implikasi timbal balik dari badan kebijakan luar negeri dan reproduksi, dan transformasi sistemik. Selain itu kebijakan luar negeri suatu negara terdapat strategi

⁴³ Ibid, hlm. 10

⁴⁴ Mark Webber, Michael Smith. *Foreign Policy In A Transformed World*. London: Routledge, 2002

⁴⁵ Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*. United States: Thomson/Wadsworth, 2004

⁶ dan taktik yang digunakan dalam berhubungan dengan negara lain guna memperjuangkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu negara merupakan gambaran dari kepentingan domestik negara tersebut yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Dengan kata lain kebijakan luar negeri ini sering dikaitkan dengan politik luar negeri suatu negara.

Politik luar negeri ini cenderung bersifat tetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun hubungan internasional. Dengan begitu politik luar negeri Indonesia memiliki prinsip dasar berpartisipasi aktif dan mandiri dari kepentingan nasional Indonesia. Implementasi dari prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan dari sisi isu-isu domestic dalam negara.

⁶ Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Setiap keberadaan suatu negara pastinya merancang suatu kebijakan yang bersumber pada kepentingan nasionalnya serta sebagai acuan dalam menetapkan diri di dalam masalah / isu-isu internasional yang lebih baik dibicarakan bersama agar lebih mudah diselesaikan bersama-sama negara lainnya sebagai bentuk keterlibatan suatu negara didalam suatu masalah.

2.2.1.1 Kebijakan Counter-Violent Extremism

Dalam memerangi terorisme melalui penanganan radikalisme dan ekstremisme kekerasan menjadi strategi nasional banyak negara. Kebijakan Counter-violent extremism menggunakan pendekatan soft power untuk bertujuan intervensi sebelum kekerasan terjadi.⁴⁶ Kontra ekstremisme kekerasan atau counter violent extremism (CVE) adalah bidang kebijakan, program, dan intervensi yang dirancang untuk mencegah individu dari terlibat dalam kekerasan yang terkait dengan politik radikal, sosial, ideologi dan kelompok budaya, dan agama.⁴⁷ Sehingga dari sini kebijakan CVE muncul untuk berfokus pada melawan pengaruh terorisme dengan cara membun ketahanan dalam masyarakat yang rentan terhadap radikalisasi. Seiringnya waktu CVE berkembang hingga CVE melihat untuk mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan dengan mengatasi akar penyebabnya ekstremisme berbasis kekerasan.⁴⁸

Gagasan tentang Melawan Ekstremisme berbasis Kekerasan memperoleh daya tarik yang meningkat pada tahun 2015 di antara aktor negara di seluruh dunia dan telah dianggap sebagai komponen penting dari strategi kontra-terorisme yang berkelanjutan.⁴⁹ CVE muncul dalam kebijakan keamanan internasional dan nasional untuk melawan dan mencegah adanya terorisme yang mementingkan *human rights*. Kebijakan kontra-terorisme mengalami pergeseran ke kontra ekstremisme berbasis

⁴⁶ William Stephens, Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature, Studies in Conflict & Terrorism Volume 44, 2021, hlm. 347

⁴⁷ Georgia Holmer, Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective, hlm. 2

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Nünlist, C, The Concept of Countering Violent Extremism, CSS Analyses in Security Policy, Nünlist, C. (2015). The Concept of Countering Violent Extremism. CSS Analyses in Security Policy, hlm. 1.

kekerasan, pergeseran ke pencegahan dimulai sebagai sebuah konsep setelah kejadian 9/11, sebagian besar didorong oleh perubahan sifat terorisme dan munculnya aktor terdesentralisasi dan radikalisi diri kelompok kecil dan serangan tunggal atau individu. Hal ini mempengaruhi cara masyarakat internasional bekerja untuk melawan ancaman terorisme.

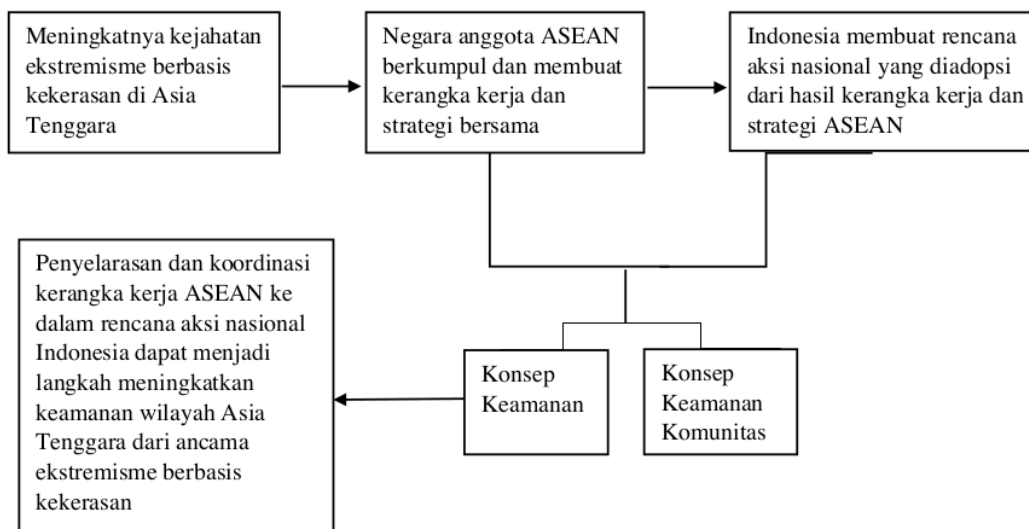
Pergeseran penekanan pada kebijakan CVE juga dikarenakan adanya realisasi antara pembuat kebijakan bahwa beberapa pendekatan kontra-terorisme yang dapat memperburuk ancaman dan meningkatkan perekrutan individu hingga masyarakat ke jajaran kelompok dan gerakan teroris. Untuk sebagian besar, kebijakan CVE mengambil pemahaman tentang bagaimana dan mengapa individu terlibat dalam kekerasan ekstremis. Karena disini ekstremisme kekerasan tidak hanya lagi terkait dengan serangan teroris namun juga karena adanya konflik, kesenjangan, dan faktor lainnya yang dapat menyebabkan puluhan ribu kematian. CVE memupuk kerja sama yang lebih erat dan pertukaran kebijakan antara aktor keamanan dan aktor di bidang manajemen konflik dan pencegahan.⁵⁰

Kebijakan CVE secara khusus fokus pada ekstremisme berbasis kekerasan setiap daerah dalam suatu negara yang akan terkena dampak ekstremisme kekerasan dan ketidakstabilan keamanan. Kebijakan ini membangun di daerah yang terpinggirkan atau zona pengaruh kelompok atau ajaran-ajaran radikal dan ekstremisme berbasis kekerasan. Elemen kunci dari kebijakan CVE terdiri dari penggunaan cara non-koersif untuk menghalangi individu atau kelompok dari

⁵⁰ *Ibid*

mobilisasi menuju kekerasan dan untuk mengurangi perekrutan, dukungan, fasilitasi atau keterlibatan dalam terorisme bermotif ideologis oleh aktor non-negara dalam memajukan tujuan politik yang dianut.⁵¹ Maka membangun ketahanan di masyarakat dan di tingkat individu dapat menjadi salah satu nilai-nilai yang ada di dalam kebijakan CVE. Tidak hanya itu saja namun CVE memuat beberapa nilai yang penting yang harus ada dalam kebijakan CVE seperti menyadari adanya pengaruh setiap gender dalam kejahatan ini, Deradikalisasi, pelepasan dan reintegrasi, dan mendukung dan meningkatkan komitmen, kapasitas, dan interaksi mitra lokal.

2.3 Kerangka Penelitian



⁵¹ UNODC, Preventing and countering violent extremism (PVE/CVE), diakses pada 4 agustus 2022, <https://www.unodc.org/e4j/zh/terrorism/module-2/key-issues/preventing-and-countering-violent-extremism.html>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipakai untuk menganalisa lebih mendalam dan menyelidiki fenomena yang terkait dengan kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan dan semua ini bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa metode kualitatif itu sendiri ialah suatu penelitian atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu peristiwa sentral. Hasilnya informasi yang sudah dicari kemudian dikumpulkan, informasi ini biasanya berupa kata atau teks.⁵² Lalu semuanya dianalisis, hasil dari analisis berupa deskripsi atau gambaran. Hasil akhirnya peneliti akan membuat self-reflection dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga pendekatan kualitatif ini memahami suatu fenomena social dengan menyelidiki, meneliti dan membuat laporan terhadap pandangan terhadap studi suatu peristiwa.⁵³

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong bahwa metode kualitatif ini mencari sumber datanya dengan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata dan tindakan, sisanya adalah data tambahan seperti yang berada di

⁵² Creswell, J.W. Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Singapore: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008

⁵³ J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo, 2010, Hlm. 7

dokumen dan lainnya.⁵⁴ Berdasarkan itu sumber data yang saya peroleh untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan kata-kata dan literatur buku yang dapat menjelaskan fenomena kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan dan bagaimana negara dapat menanggulangnya agar mencapai keamanan regional. Dokumen yang saya gunakan disini ialah rencana aksi ASEAN dan rencana aksi nasional dari Indonesia.

Untuk menambahkan diatas menurut Leininger bahwa metode kualitatif ini tidak hanya untuk mengukur sesuatu namun harus bisa memahami sepenuhnya makna dari fenomena yang masih dalam konteks dan harus juga bisa memberikan laporan mengenai fenomena yang dikaji.⁵⁵ Maka untuk dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tentang ekstremisme berbasis kekerasan penulis menggunakan metode ini.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang dapat mengetahui atau dapat menyelidiki masalah sosial dengan menyajikan hasil akhir melalui distribusi dan analisis fenomena dengan kerangka teoritis yang jelas. Jenis penelitian ini dilengkapi dengan data dan bukti tentang fenomena yang terjadi. Dalam hal ini, penelitian akan dapat menggambarkan peristiwa atau fenomena dengan menganalisis data-data yang diperoleh dengan studi literatur. Melalui jenis penelitian deskriptif ini, penulis akan berusaha menjelaskan dan

⁵⁴ Lexy J. Moleong. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999, Hlm. 2-6

⁵⁵ http://repository.upi.edu/9266/4/t_pu_0909450_chapter3.pdf, diakses pada 24 November 2021 pukul 17:45

memaparkan bagaimana untuk melawan dan menyelesaikan isu ekstremisme berbasis kekerasan membutuhkan rencana aksi tidak hanya dari regional namun juga negara harus bisa membuat rencana aksinya sendiri agar bisa meningkatkan keamanan regional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono dalam buku *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, sumber data sekunder merupakan sebuah pengumpulan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti.⁵⁶ Maka untuk itu, pengumpulan sumber data yang mendukung penelitian diperoleh melalui buku, jurnal, laporan dan sumber lainnya yang diperoleh dengan internet. Setelah pengumpulan data ini, penulis kemudian menyajikan hasil temuannya dengan menggunakan teknik penyajian data narasi. Melalui kajian literatur, pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada artikel, buku, jurnal, dokumen, media berita, media online yang relevan.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Secondary Analysis. Secondary analysis digunakan untuk dapat menggambarkan analisis dengan menggunakan data-data yang sudah ada atau yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau pemerintah dalam membuktikan pertanyaan penelitian. Peneliti akan menganalisis data yang didapat dalam bentuk dokumen-dokumen pemerintah terkait ekstremisme berbasis kekerasan seperti Peraturan Presiden

⁵⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2013, Hlm. 308

⁷ Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan Yang Mengarah ke Terorisme (2020- 2024), ASEAN Plan Of Action to Prevent and Counter The Rise Radicalisation and Violent Extremism (2018 – 2025), Bali Work Plan of The ASEAN Plan Of Action to Prevent and Counter The Rise Radicalisation and Violent Extremism (2019-2025), buku dan jurnal.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Dinamika Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Menuju pada Terorisme di Asia Tenggara

Perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan sudah terjadi sejak dahulu yang dimana kejahatan ini dimulai dengan adanya bentuk kejahatan murni seperti pembunuhan dan ancaman untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangan ini bermula dari adanya aliran kepercayaan fanatisme yang akhirnya terjadi pembunuhan, pembunuhan ini dilakukan secara perorangan hingga dengan kelompok. Awal mulanya ekstremisme berbasis kekerasan hanya mempunyai satu definisi yaitu terorisme. Pada Sejarah terorisme terjadi pada abad 19, yang dimulai dengan adanya aksi terorisme yang dilakukan oleh Armenia melawan pemerintah turki pada tahun 1890-an.⁵⁷

Terorisme modern dapat ditelusuri kembali ke radikalisme revolusioner abad kesembilan belas di negara-negara barat dengan munculnya kelompok "anarkis", "anarkis kolektivis" dan "anarko-komunis".Revolusioner Jerman Karl Heinzen adalah orang pertama yang mengartikulasikan penggunaan kekerasan, bahkan pembunuhan massal, oleh individu-individu untuk mempengaruhi perubahan politik dalam pamfletnya yang berpengaruh pada tahun 1853, *Mord und Freiheit*, menciptakan istilah *Freiheitskämpfer* atau "pejuang kemerdekaan" dalam

⁵⁷ Ansori Pardomuan, "Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara", 2018, diakses pada 12 Juni 2022 di www.eprints.undip.ac.id

prosesnya.⁵⁸ Namun, karena kaum radikal awal ini menjadi kecewa dengan kegagalan mereka untuk memprovokasi revolusi sosial yang meluas di kalangan petani melalui cara-cara tradisional seperti mendistribusikan pamflet dan selebaran politik yang mendesak pemberontakan dan kerusuhan untuk menempatkan pemerintah di bawah tekanan, mereka malah beralih ke kekerasan dengan harapan memaksa reformasi politik dan merusak Negara. Dengan cara ini, "propaganda dengan perbuatan", sebagai strategi untuk tindakan politik. Propaganda ini menjadi pusat politik anarkisme di Eropa.⁵⁹

Lalu fenomena terorisme meroket setelah Perang Dunia II. Terorisme dan aksi terror berkembang hingga akhirnya masuk kedalam isu-isu lainnya seperti isu sengketa, ideologi, perjuangan kemerdekaan hingga fanatisme agama. Keadaan ini akhirnya menjadi isu keamanan disetiap negara karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam negeri. Maka, seiring dengan perkembangan jaman dan globalisasi, isu-isu mengenai keamanan mengalami perubahan. Seperti pada kasus terorisme 11 September di World Trade Center (WTC) Amerika Serikat (AS), kasus ini menjadi kasus yang menjadi sorotan dunia mengenai isu terorisme. Konsekuensi dari adanya peristiwa ini adalah dimana AS membuat strategi untuk memerangi terorisme dengan mengorganisir kampanye dan menawarkan bantuan ke negara-negara lain untuk memerangi teror. Lalu langkah selanjutnya yang diambil AS adalah mengirim pasukan tentara mereka ke Afghanistan pada tahun 2002 dan Irak pada tahun 2003, yang mereka sebut perang melawan terror atau War On Terror (WOR),

⁵⁸ UNODC, "University Module Series: Counter-Terrorism", 2018, diakses pada 12 Juni 2022, <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-1/key-issues/terrorism-in-19th-century.html>

⁵⁹ *Ibid*

karena dianggap bahwa kedua negara terkait dengan kelompok teroris dan juga dengan serangan 11 September.⁶⁰

Namun, akibat dari langkah kebijakan yang di ambil oleh AS pada saat itu telah menyebabkan peningkatan gerakan-gerakan kekerasan dan muncul berbagai kelompok kekerasan. Sehingga kebijakan ini meningkatkan serangan yang semakin kompleks dan susah dipecahkan. Munculnya gerakan dan kelompok kekerasan akhirnya sampai ke kawasan Asia Tenggara, dimana kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan rawan dari masalah internasional. Asia Tenggara juga menjadi kawasan yang vital dengan beberapa negara Asia Tengah dan Timur Tengah, karena hal itu kawasan ini menjadi tempat domisili dan pembelajaran jaringan terorisme yaitu Jamaah Islamuyah (JI).⁶¹

Diwilayah Asia Tenggara terorisme memiliki karakteristik sendiri yang dapat dibedakan dari terorisme negara lain. Terorisme di wilayah Asia Tenggara bermula dan berkaitan dengan gerakan rebel sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan negara masing masing. Kepemimpinan otoritarianisme dan pembangunan negara yang tidak setara di wilayah Asia menjadi salah satu memunculkan gerakan bawah tanah. Dalam modus operandinya, aksi terorisme di wilayah Asia Tenggara memiliki perkembangan yang sangat dinamis. Dimana banyak menggunakan peledakan bom sebagai modus operandi hingga menggunakan penyerangan sporadic. Cara-cara ini dilakukan untuk sebuah protes terhadap

⁶⁰ Mohamad Keling dkk., "The Problems of Terrorism in Southeast Asia" *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol 1, No 1, 27-48

⁶¹ *Ibid*

pemerintahan dari masing-masing kelompok di negaranya. Maka dari sini kelompok ini dimanfaatkan dalam penyebaran ideologi radikal sebagai alasan mereka dalam bertindak kejahatan ini.⁶²

⁷ Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang menuju pada terorisme di Asia Tenggara berkembang dan berubah menjadi dua fase, pertama ialah fase adanya Islamic State dan fase al Qaeda. 400 teroris dari Asia Tenggara pergi ke wilayah dengan adanya rawan terorisme ke Afghanistan dan Pakistan pada era al Qaeda sendiri. Individu ini mendapatkan pengalaman hingga Latihan perang lalu Kembali lagi ke Asia Tenggara. Lalu dari sini baru muncul banyak kelompok-kelompok baru di Asia Tenggara, mereka menciptakan Islamic state atau sebuah Jemaah seperti Militan Malaysia (KMM), Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina, dan Jemaah Islamiyah (JI) di Singapura dan Indonesia. Pada fase kedua adalah fase IS-Sentris dengan banyaknya kelompok-kelompok militant Asia Tenggara berafiliasi dengan IS seperti Jamaah Ansharud Daulah di Indonesia dan Negara Islam Lanao (Maute Group) dan IS di Filipina muncul. Sejak pertengahan 2014, di paling sedikit 63 kelompok di Asia Tenggara yang memiliki berjanji sumpah setia kepada pemimpin ISIS Abu Bakr al Baghdadi.⁶³

Karena negara-negara di Asia Tenggara sangat beragam etnis maka Asia Tenggara menjadi rumah bagi berbagai kelompok etnonasionalis. Seperti di Thailand Patani United Liberation Organisasi (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN), the

⁶² Alex P. Schmid. "The Routledge Handbook of Terrorism Research".2011 Diakses pada <https://www.routledge.com/The-Routledge-Handbook-of-Terrorism-Research/Schmid/p/book/9780415520997>

⁶³ Ryamizard Ryacu, Terrorism in Southeast Asia: The Need for Joint Counter-Terrorism Frameworks, Counter Terrorist Trends and Analyses Volume 10, 2018, hlm. 1-3

Kelompok Mindanao Front Pembebasan Islam Moro (MILF), namun kelompok-kelompok ini akan menjadi kelompok dengan melakukan tindak kekerasan. Karena disini kelompok etnonasionalis mereka tidak didorong oleh kebutuhan untuk menghancurkan lawan mereka dan berpotensi terbuka untuk penyelesaian yang dinegosiasikan. Namun dengan seiringnya waktu, kelompok ini dapat meningkatkan cara-cara kekerasan mereka. Seperti pada kelompok bersenjata (EAGs) di Myanmar dan kelompok pemberontak di Maois, dimana mereka menggunakan terror dan ideologi separatis yang menolak semua pluralism dan mengasosiasikan kehidupan mereka dengan harus merugikan Orang lain.⁶⁴

Perbedaan antara kelompok dapat tampak lebih jelas, tetapi juga bahwa penyebab ekstremisme kekerasan sangat bervariasi dari komunitas ke komunitas, bahkan di satu negara atau provinsi. Mereka yang bergabung dengan kelompok ekstremis seringkali memiliki cerita yang rumit dan motivasi non-linier. Selain itu, pilihan yang mereka buat memiliki efek langsung dan tidak langsung pada orang-orang di sekitar mereka: pasangan, anggota keluarga, tetangga, teman, dan anggota komunitas mereka.⁶⁵

Tidak hanya itu ekstremisme berbasis kekerasan di Asia Tenggara sangat terkait erat kekerasan dengan motivasi yang menuju radikalisme. Motivasi radikal ini diperoleh dari adanya konflik etnis dan agama. Di Asia Tenggara sendiri memiliki

⁶⁴ Pusat Studi Asia Tenggara UGM, Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, dan Dinamika, 29 Januari 2020, diakses pada <https://pssat.ugm.ac.id/id/konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan-penyebab-proses-dan-dinamika/>

⁶⁵ Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia, 20 November 2020 diakses pada <https://www.undp.org/asia-pacific/tolerance-and-diversity/publications/entry-and-exit-points-violent-extremism-south-east-asia>

penduduk muslim terbanyak dengan lebih dari 40% adalah muslim. Populasi muslim terbanyak ada di Indonesia dengan 230 juta dan kedua ada di Malaysia dengan 16,6 juta.⁶⁶ Maka konflik etnis dan agama yang terjadi di Asia Tenggara ialah bentrokan antara penduduk muslim dan pemeluk agama lain. Seperti di Filipina yang dimana kelompok atau Gerakan muslim yang mempertahankan keadilan bagi kelompoknya yang terbelakang di pusat-pusat agama lainnya. Namun dengan seiring perkembangan waktu, kelompok ini dimanfaatkan dengan ideologi radikal dan gerakan separatis. Kini agama Islam menjadi sebuah alasan terjadinya operasi militer organisasi teroris radikal dan pemberontak. Islam radikal di Asia Tenggara terbagi secara organisatoris, juga dalam dogma, strategi, dan politik. Tapi mereka dipersatukan oleh keinginan untuk mengislamkan kawasan, anti-Amerikanisme, anti-komunisme, dan permusuhan dengan peradaban Barat. Jaringan teroris radikal mencakup seluruh wilayah, terutama negara-negara berpenduduk padat dengan populasi Muslim yang signifikan.

Dari sini terbentuklah kelompok-kelompok Islamic State (IS) atau Negara Islam (NI), kelompok ini dipimpin oleh kekhilafah-an yang ada di Timur Tengah. Pada 29 Juni 2014, Negara Islam (IS) – juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL – menghadirkan ambisi besar untuk menghapus pemerintahan sekuler dan menyebarkan versi pemerintahan Islamnya ke seluruh negara mayoritas muslim. Salah satunya Abu Bakr Al-Baghdadi yang dimana ia meminta kelompok-kelompok Islam radikal di

⁶⁶ *Ibid*

tempat lain bergabung dengannya.⁶⁷ Visi yang dilakukan oleh kelompok ekstremis ini adalah bahwa NII dapat merumuskan strategi agresif untuk mengusir lawan-lawannya dan menyerap anggota kelompok militan yang ada. Sejak awal, Negara Islam berusaha untuk membedakandirinya dari kelompok-kelompok Islam yang mapan dan menyerang dengan menggunakan militer dan ideologi radikal. Propaganda kuat Negara Islam menarik perhatian banyak militan di berbagai belahan dunia termasuk Asia. Kelompok ini dengan cerdas mengeksploitasi ketidakadilan dan keluhan yang nyata dan dirasakan Muslim di dalam bermasyarakat di berbagai negara dan menawarkan ganti rugi individu. Propaganda ini meyakinkan banyak Muslim di seluruh dunia yang bergabung dengan Negara Islam akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi kedalam kelompok ini.⁶⁸

Beberapa negara di Asia Tenggara yang mempunyai kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yaitu di Indonesia ada Negara Islam Indonesia (NII) atau Negara Islam Indonesia, Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) atau Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK)⁶⁹; di Filipina sana adalah Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Abu Sayyaf, dan Maute di Thailand ada Patani United Liberation Organization (PULO), Barisan Revolusi Nasional-Koordinasi (BRN-K) atau Koordinasi Front Revolusioner Nasional, the unit militer Grup Kecil Runda, terkait dengan Pejuang Kemerdekaan BRN-K Patani (Pejuang Kemerdekaan) Gerakan Mujahidin Islam

⁶⁷ Ashley L. Rhoades, Todd C. Helmus, Countering Violent Extremism in the Philippines A Snapshot of Current Challenges and Responses, diakses pada 13 Juni 2022
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR233-2.html

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

Patani (GMIP) atau Patani Islamic Mujahideen Gerakan, dan Gerakan Muslim Mujahidin Patani (GMMP) atau Muslim Mujahidin Gerakan Patani.

Maka kelompok ekstremisme berbasis kekerasan sangat mudah untuk bangkit dan menggantikan kepemimpinan dibangun ke dalam struktur jaringan gerakan dan organisasi mereka. Karena sifat jaringan koneksi yang dapat dimiliki kelompok ekstremis radikal, mereka dengan mudah melakukan pembalasan terhadap tindakan negara yang mereka pikir telah menghancurkan mereka. Jaringan ekstremis yang luas tersebar di seluruh Asia Tenggara, karena mereka terkait erat oleh kepercayaan atau sekte pribadi, keluarga, dan agama, membuat mereka sulit untuk diidentifikasi dan menghancurkan. Sehingga membutuhkan Kerjasama berbagai negara agar bisa menanggulangnya.

4.2 Ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju pada Terorisme di Asia Tenggara

4.2.1 Filipina

Ancaman ekstremisme berbasis kekerasan di Filipina sudah berlangsung sejak lama dan memiliki sejarah yang panjang. Sejarah terorisme, pemberontakan, dan bentuk-bentuk lain kekerasan yang dimotivasi secara ideologis dimulai setidaknya pada tahun 1970-an, dengan munculnya tokoh separatis Muslim, Komunis, dan kelompok militan pertama di negara itu. Pembentukan kelompok ini dikarenakan isu-isu social yang ada di Filipina seperti kemiskinan ekstrem di beberapa wilayah Filipina, perpecahan antara budaya dan komunitas Katolik dan

Muslim, konflik dengan pemerintah, dan konflik-konflik ini dapat menciptakan lingkungan yang matang bagi ideologi kekerasan untuk berakar.⁷⁰

Di Filipina terdapat beberapa organisasi atau kelompok yang melakukan tindak kekerasan dikarenakan pemerintahannya seperti Abu Sayyaf Group (ASG), Gang Pentagon, serta Moro Islamic Liberation Front (MILF), New People's Army (NPA). Di Asia Tenggara pada tahun 1980-an, diwarnai kejahatan terorisme yang selalu berkaitan dengan pergerakan atau *rebellion* sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim di masing-masing negara tak terkecuali Filipina, hingga pada tahun 2013 Filipina pun masih berurusan dengan kelompok pergerakan ini seperti pada contohnya New People Army (NPA).⁷¹

Namun pada tahun 2016 munculnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Negara Islam (IS) di pulau Mindanao. Memulai aksinya dengan pengepungan di kota Marawi, yang dimana kota berpenduduk mayoritas Muslim, kelompok ini bernama Maute Group (MG) sebuah kelompok Jihadis. Di tahun yang sama ISIS mulai menyerukan rekrutan untuk bergabung dengan jihad di Filipina alih-alih kekhalifahannya yang berbasis di Irak dan Suriah, mendorong para pejuang dari seluruh dunia untuk menjadi tentara dan melakukan perjalanan ke Filipina.⁷²

⁷⁰ Ashley L. Rhoades, Todd C. Helmus, *Loc.Cit*

⁷¹ Chaidar, A., Akmal, M., Ali, S., Amalia, N., Effida, D., & Sahrasad, H, MASYARAKAT MINDANAO, ABU SAYYAF DAN MASALAH KEAMANAN KAWASAN. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 7(1), 2018, hlm. 1-44

⁷² *Ibid*

Pada tahun yang sama, Pemimpin ISIS yang sekarang sudah meninggal, Abu Bakr al-Baghdadi, menunjuk beberapa kelompok-kelompok kecil yang berbasis di Filipina untuk berjanji setia kepada ISIS. Maka sejak tahun 2016 ISIS-Filipina menggabungkan beberapa kelompok militan dan beberapa kelompok lainnya di beberapa wilayah Filipina. ISIS-Filipina berperan penting dalam mengatur pengepungan Marawi pada tahun 2017 dan militan yang berafiliasi dengan ISIS berhasil merebut kota di Marawi. Meskipun akhirnya kalah di Marawi di tangan militer Filipina, ISIS memutar inisialnya kemenangan untuk keuntungannya, menampilkan pertempuran berat dalam perekrutannya propaganda.⁷³

Beberapa serangan ekstremisme berbasis kekerasan yang menuju pada terorisme di Filipina dari tahun 2016 hingga tahun 2021 seperti:⁷⁴

1. Pada tahun 2016

9 April 2016 terjadi serangan terhadap pasukan keamanan Filipina di pulau basilan selatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengklaim kesetiaan kepada ISIS. Kelompok ini bernama Abu Sayyaf Group (ASG). Ada puluhan senjata kecil dan serangan alat peledak improvisasi, penculikan untuk tebusan, dan upaya pemerasan. Insiden penting termasuk:

- Pejuang ASG di Sulu memenggal dua sandera Kanada, satu pada bulan April dan satu pada bulan Juni, ketika tebusan

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ UNHCR, Country Reports on Terrorism 2016 – Philippines, diakses pada 15 Juni 2022
<https://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html>

mereka tidak dibayar. Kedua pria itu telah ditawan sejak September 2015.

- Pada Juli, tujuh tentara pemerintah tewas dalam bentrokan dengan gerilyawan CPP/NPA di Mindanao timur.
- Pada bulan Agustus, 50 pejuang yang terkait dengan DIL menyerang sebuah penjara di Marawi, membebaskan delapan anggota yang ditahan.
- Pada 2 September, sebuah pasar malam kota Davao dibom, menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 orang. Pemerintah menangkap beberapa tersangka yang berafiliasi dengan Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro dan DIL atas pemboman tersebut.
- Pada 24 November, pejuang DIL untuk sementara merebut pusat kota Butig, sebuah kota berpenduduk 16.000 orang di Mindanao, yang mengakibatkan enam hari pertempuran yang menewaskan puluhan pejuang DIL.

2. Pada tahun 2017

- Selama Pertempuran Kota Marawi, kelompok radikal yang sejajar dengan ISIS menyerang, menduduki, dan menghancurkan beberapa bangunan publik utama dan menyandera puluhan warga sipil sebagai perisai manusia. Mereka juga dilaporkan membantai dan memenggal kepala warga sipil yang ditawan.

- Namun, serangan bersenjata terhadap warga sipil dan pasukan keamanan terus berlanjut. pada 22 Juni, pasukan keamanan menyelamatkan setidaknya 60 warga sipil yang disandera setelah serangan BIFF di Cotabato Utara. Tersangka anggota Kelompok Abu Sayyef menyerang sebuah desa di Basilan pada 21 Agustus, menewaskan sedikitnya sembilan warga sipil dan melukai selusin lainnya.
- Serangan 3 Desember terhadap sebuah kantor polisi di Misamis Oriental oleh sekitar 100 anggota CPP/NPA menunjukkan seringnya kelompok itu melakukan pemogokan terhadap target militer, polisi, dan pejabat pemerintah daerah.

3. Pada tahun 2018

- Kelompok militan meledakkan bom mobil di sebuah pos pemeriksaan militer pada 30 Juli di pulau Basilan, Filipina selatan, menewaskan sedikitnya 10 orang dalam serangan ini menggarisbawahi bahwa ancaman pemberontak yang terus berlanjut di bagian selatan negara itu.

4. Pada Tahun 2019

- 8 Juni 2019, serangan bunuh diri ganda di sebuah pangkalan militer di Indanan di Provinsi Sulu menewaskan 3 warga sipil dan 3 personel militer serta 2 penyerang. 22 orang lainnya terluka

- 27 Januari 2019, 27 orang tewas dan lebih banyak lagi luka-luka akibat serangan bom di sebuah katedral Katolik Roma di Pulau Jolo di Provinsi Sulu

5. Pada tahun 2020

- 24 Agustus 2020, terjadi ledakan ganda di Jolo, Sulu yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka

6. Pada tahun 2022

- 15 Januari 2022. Tentara membunuh orang yang diduga sebagai pemimpin kelompok militan yang terkait dengan ISIS dan tiga lainnya dipersalahkan atas pemboman bus yang menewaskan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun di awal pekan. Tentara menembak dan membunuh Norodin Hassan dan anak buahnya di dekat kota Carmen di provinsi Cotabato.
- 25 Januari 2022. Dua tersangka kurir bom tewas setelah ditembak polisi yang sedang melakukan pemeriksaan di kota Esperanza. Tersangka diidentifikasi sebagai Guimaludin Kasan (32) dan seorang Bronx, keduanya Warga Guindulungan, Maguindanao.

Dengan banyak kasus-kasus pemberontakan dan ekstremisme berbasis kekerasan sehingga ancaman-ancaman yang ditimbulkan berupa meningkatkan krisis kemanusiaan, pelanggaran HAM, terhentinya sosial ekonomi di beberapa wilayah yang sedang terkena konflik. Keadaan jika adanya kelompok ekstremisme berbasis kekerasan, maka ancaman yang ditimbulkan adalah adanya ketidakamanan dalam negeri dan masih adanya konflik dan gencatan bersenjata, tantangan politik, dan tantangan militer.

4.2.2 Thailand

Provinsi paling selatan Thailand menjadi lokasi kelompok pemberontak separatis etnis Melayu yang berjuang kemerdekaan Yala, Narathiwat dan Pattani. Daerah ini menjadi daerah yang dibawa oleh pemerintahan Thailand pada saat kemerdekaan. Sejak pemberontakan meletus pada tahun 2004, kelompok separatis telah melakukan sejumlah serangan kekerasan. Kelompok-kelompok ini dilaporkan tidak memiliki kepemimpinan sentral dan menganut ideologi yang berbeda, namun, kelompok Islam militan diyakini merupakan mayoritas pemberontak. Pada Januari 2019, pemberontakan separatis telah menewaskan sekitar 7.000 orang. Setidaknya 12.000 lainnya terluka dalam konflik tersebut.⁷⁵

Negara ini, Thailand, memiliki beberapa organisasi atau kelompok teroris sendiri seperti War Ka Raeh (WKR) dan Guragan Mujahadin Islam Pattani, Pattani ini memiliki hubungan yang dekat dengan Jamaah Islamiyah. Kelompok teroris lainnya yang berasal dari Thailan adalah Petani United Liberation Organizaion (PULO). Kelompok ini mempunyai hubungan dengan Abu Sayyaf Group yang ada di Filipina. Lalu kelompok teroris termasuk al-Qaeda, Jemaah Islamiyah (JI), dan Hizbullah dilaporkan beroperasi di dalam Thailand menggunakan negara itu sebagai titik transit dan sebagai basis untuk merencanakan serangan. JI diyakini telah merencanakan pemboman tahun 2002 di Bali, Indonesia, dari rumah persembunyian di ibu kota Thailand, Bangkok. Selain itu, agen Iran diduga berusaha menyerang diplomat Israel di tanah Thailand. Dalam beberapa tahun

⁷⁵ Counter Extremism, Thailand: Extremism and Terrorism, diakses pada 18 Juli 2022
<https://www.counterextremism.com/countries/thailand-extremism-and-terrorism>

terakhir, sejumlah warga Thailand dilaporkan telah mengakses propaganda ISIS secara online, dan telah mencetak dan menjual barang-barang pakaian pro-ISIS.⁷⁶

Beberapa serangan ekstremisme berbasis kekerasan di Thailand dari tahun 2016-2021 yaitu:⁷⁷

1. Tahun 2016

- Pemberontak melakukan ratusan serangan terutama di wilayah selatan Thailand. Metode termasuk penembakan, pembakaran, dan penggunaan alat peledak improvisasi (IED) dan alat peledak improvisasi kelahiran kendaraan (VBIED). Pada 11 dan 12 Agustus, serangkaian 11 pemboman dan serangan pembakaran yang hampir bersamaan melanda tujuh provinsi di selatan atas Thailand, termasuk tujuan wisata populer Hua Hin dan Phuket. Serangan itu, yang menewaskan empat orang dan melukai sedikitnya 37 orang, dilakukan dengan IED kecil yang dipicu oleh ponsel.

2. Tahun 2017

- Pemberontak Muslim Melayu etno-nasionalis melakukan ratusan serangan di provinsi paling selatan Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla, yang dikenal sebagai Ujung Selatan Thailand. Metode termasuk penembakan,

⁷⁶ Counter Extremism, Thailand: Extremism and Terrorism, diakses pada 18 Juli 2022 <https://www.counterextremism.com/countries/thailand-extremism-and-terrorism>

⁷⁷ Refworld, <https://www.refworld.org/docid/5bcf1f7b11.html>

pembakaran, alat peledak improvisasi (IED), dan IED yang ditularkan melalui kendaraan (VBIED). Sejak konflik melonjak pada tahun 2004, pemberontak sebagian besar telah membatasi serangan mereka ke empat provinsi paling selatan. Serangan terkait terorisme meliputi:

- Pada 6 April, serangkaian setidaknya 20 serangan bom dan pembakaran yang hampir bersamaan dilakukan di provinsi-provinsi selatan Thailand, menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.
- Pada 9 Mei, dua bom meledak di sebuah supermarket di Pattani, melukai 61 orang, termasuk 13 anak-anak, tetapi tidak menyebabkan korban jiwa. Sebuah bom kecil dipicu di dalam toko sebelum VBIED dipicu di luar toko sekitar 15 menit kemudian. Sementara kekerasan dan pemboman di Ujung Selatan adalah hal biasa, penggunaan VBIED pada target sipil jarang terjadi.
- Pada 22 Mei, sebuah bom kecil meledak di Rumah Sakit Phra Mongkut Bangkok, melukai 24 orang. Rumah sakit ini dikelola militer dan ledakan itu terjadi pada peringatan ketiga kudeta militer 2014. Seorang tersangka yang ditangkap pada Juni diduga mengaku menanam bom dan mengaku membenci rezim militer.

- Pada 16 Agustus, sekelompok tujuh pria bersenjata mencuri enam truk pick-up dari dealer mobil bekas di Songkhla, menyandera empat orang, dan menewaskan satu karyawan dealer. Orang-orang itu kemudian mengendarai lima mobil ke selatan ke Pattani.

3. Tahun 2019

- Pada bulan Januari, serentetan serangan teroris terjadi, termasuk bom mobil di luar pangkalan keamanan di Provinsi Songkhla yang melukai dua petugas polisi, penembakan yang menewaskan empat sukarelawan pertahanan yang menjaga sebuah sekolah di Provinsi Pattani, dan serangan terhadap sebuah kantor polisi di Provinsi Narathiwat yang menewaskan satu petugas polisi.
- Pada 18 Januari, dua biksu Buddha tewas dalam serangan pemberontak di Provinsi Narathiwat, biksu pertama yang tewas dalam serangan pemberontak dalam tiga tahun. Serangan itu menyusul pembunuhan tiga imam oleh penyerang tak dikenal dalam dua bulan sebelumnya.
- Selama 9-10 Maret, serangkaian bom pipa buatan sendiri meledak di provinsi selatan Satun dan Phattalung tetapi mereka tidak menyebabkan kematian atau cedera. Kedua provinsi berbatasan dengan Ujung Selatan, tetapi tidak memiliki sejarah aktivitas terkait pemberontak.

- Pada 26 Mei, serangan bom di sebuah stasiun kereta api di Provinsi Songkhla menewaskan satu petugas polisi dan melukai tiga lainnya.
- Pada 2 Agustus, serangkaian ledakan skala kecil terkoordinasi terjadi di seluruh Bangkok ketika kota itu menjadi tuan rumah lebih dari 30 Menteri Luar Negeri untuk pertemuan Tingkat Menteri asean dan pertemuan terkait. Bom improvisasi kecil tidak menyebabkan cedera atau kerusakan parah. Meskipun belum ada atribusi resmi atau klaim tanggung jawab, sebagian besar ahli Ujung Selatan mengklaim itu kemungkinan terkait dengan pemberontakan. Tiga tersangka didakwa pada November atas 11 dakwaan terkait pemboman Agustus di Bangkok, termasuk terorisme. Kasus ini saat ini sedang dalam pemeriksaan pra-persidangan dan persidangan dijadwalkan akan dimulai pada September 2020.
- Pada 5 November, 15 orang tewas dan empat lainnya terluka dalam serangan larut malam di sebuah pos pemeriksaan di Provinsi Yala yang menargetkan polisi, pejabat pemerintah, dan sukarelawan keamanan setempat dalam serangan paling mematikan sejak kekerasan muncul kembali pada tahun 2004. Diperkirakan 10 hingga 20 penyerang menggunakan senjata dan bom kecil dalam serangan itu.

4. Tahun 2021

- Tercatat 423 insiden kekerasan, menyebabkan 104 orang tewas dan 169 terluka hingga November 2021. Skalanya mirip dengan tahun 2020 ketika 335 insiden kekerasan terjadi, menyebabkan 116 tewas dan 161 luka-luka.
- 3 Agustus 2021. Konflik antara otoritas utama Buddha dan separatis Muslim di wilayah paling selatan meletus dalam kekerasan lagi pada dini hari ketika seorang polisi militer Thailand tewas dan empat lainnya terluka parah dalam serangan oleh tersangka militan Islam. Para penyerang dilaporkan melemparkan bom pipa ke dalam kompleks dan melepaskan tembakan dengan senjata tingkat militer, yang mendorong penjaga di dalam untuk membalas tembakan selama baku tembak yang berlangsung sekitar 15 menit dan melihat satu penjaga tewas dengan empat lainnya membutuhkan perawatan di rumah sakit.

5. Tahun 2022

- 25 Mei 2022. Barisan Nasional Revolusi (BRN), sebuah gerakan separatis Muslim selatan, telah mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap sebuah kantor polisi laut di Narathiwat.

4.2.3 Myanmar

Myanmar memiliki banyak pemberontakan etnonasionalis, banyak yang telah berlangsung selama enam dekade. Menurut beberapa perkiraan, konflik

berdampak hingga 60 persen wilayah negara bagian. Beberapa etnis bersenjata kelompok (EAG) telah melakukan pembicaraan damai dengan pemerintah sejak 2013. Pada tahun 2015, Perjanjian Gencatan Senjata Nasional ditandatangani antara negara bagian dan sepuluh EAG. Delapan kelompok belum menandatangani, termasuk Organisasi Kemerdekaan Kachin yang besar dan United Wa Tentara Negara, serta kelompok lainnya.⁷⁸

Di daerah yang didominasi oleh ini kelompok, sering bentrokan serius terus terjadi. Kelompok etnis minoritas berpendapat bahwa sejak Myanmar memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, mereka telah ditolak otonomi dan federalisme mereka dijanjikan dalam perjanjian Panglong. Bukti empiris menunjukkan bahwa bahkan setelah demokrasi transisi dimulai pada tahun 2011, kelompok etnis minoritas tetap ada pinggiran, secara fisik dan politik. Bamar Buddha melanjutkan mendominasi negara, memaksakan ideologi agama dan etnis dominasi atas orang lain. Dalam lanskap konflik yang padat ini, kekerasan negara diarahkan pada minoritas Rohingya yang telah menarik perhatian internasional.⁷⁹

Sistem identitas etnis yang kaku, didasarkan pada hukum kolonial dan diperkuat oleh ideologi negara yang homogen, telah menyebabkan kekerasan negara di Negara Bagian Rakhine. Pencarian fakta independent misi yang didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB selesai bahwa ada alasan untuk menjamin penyelidikan atas genosida. Operasi militer terhadap Rohingya, sebagai

⁷⁸ UNDP, Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia, 2020 hlm. 22, diakses pada www.undp.org/content/dam/undp/en/publications/entryandexitpointsviolentextremisms.pdf

⁷⁹ *Ibid*

pembalasan atas serangan dipasang pada tahun 2016 oleh Arakan Rohingya Salvation Army kecil, mengakibatkan 750.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam hitungan bulan; hanya 600.000 Rohingya yang tersisa di Myanmar. Skalanya pidato kebencian terhadap minoritas Rohingya, dan tingkat untuk yang banyak di Myanmar telah mengadopsi pandangan bermusuhan terhadap mereka, menggambarkan bagaimana kewarganegaraan dan identitas adalah inti dari ini respon yang tidak proporsional.⁸⁰

4.2.4 Malaysia

Di Malaysia, jaringan kelompok Komunis pra 9/11 dan jamaah Islamiyah pasca 9/11 dipandang sebagai teroris yang mengancam keamanan nasional Malaysia terlebih dengan berlangsungnya peristiwa pembajakan pesawat Malaysia Airlines 653 12 pada tahun 1997 dan keterlibatan beberapa warga negara Malaysia yang menjadi pentolan aksi-aksi teror di Indonesia.⁸¹

Malaysia menjadi negara titik transit dan negara tujuan bagi anggota kelompok teroris termasuk ISIS, Kelompok Abu Sayyaf (ASG), al-Qa'ida, dan Jamaah Islamiyah. Orang-orang yang terkait dengan ISIS atau ASG yang merencanakan perjalanan ke Filipina selatan atau Timur Tengah menggunakan Malaysia sebagai titik transit. Malaysia memantau, menangkap, mendeportasi, dan mengadili tersangka pendukung kelompok teroris. Malaysia juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dan lainnya untuk meningkatkan keamanan perbatasan di

⁸⁰ *Ibid*

bandara dan di Laut Sulu, untuk melawan perekrutan teroris, dan untuk meningkatkan penuntutan kejahatan terkait terorisme.⁸²

Beberapa kasus-kasus ekstremisme berbasis kekerasan yang telah terjadi pada tahun 2016-2021 ialah:

1. Pada tahun 2016⁸³

- Pada 28 Juni, penyerang yang berafiliasi dengan ISIS melemparkan granat tangan ke sebuah bar di Puchong, melukai tujuh warga Malaysia dan satu turis Tiongkok. Dua warga Malaysia ditangkap dan didakwa atas serangan itu, dan dua warga Malaysia tambahan yang ditangkap pada minggu-minggu berikutnya diyakini terkait dengan serangan itu.
- Ada sejumlah penculikan di perairan teritorial Malaysia dekat Sabah Timur oleh orang-orang bersenjata yang memiliki hubungan dengan ASG, meskipun penculikan itu tampaknya lebih untuk keuntungan finansial daripada alasan ideologis. Para penyerang menggunakan speedboat untuk mendekati dan naik ke kapal dan para korban kemudian diangkut ke Filipina selatan, di mana mereka ditahan untuk tebusan.
- Pada 6 November, orang-orang bersenjata di speedboat menyerang kapal pesiar pribadi, menculik seorang pria

⁸² BUREAU OF COUNTERTERRORISM, Country Reports on Terrorism 2020: Malaysia diakses pada 19 Juli 2022, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/malaysia/>

⁸³ Counter Extremism Project, Malaysia: Extremism and Terrorism, diakses pada 25 Juli 2022 <https://www.counterextremism.com/countries/malaysia-extremism-and-terrorism>

Jerman berusia 70 tahun dari kapal pesiarnya dan membunuh istrinya, yang dilaporkan mencoba menahan serangan itu. Seorang juru bicara ASG mengklaim kapal pesiar itu awalnya dicegat saat berlayar di dekat Tanjong Luuk Pisuk, Sabah.

- Pada 8 Desember, polisi membunuh tiga tersangka penculik dan menangkap dua orang lainnya selama baku tembak di lepas pantai Semporna setelah para tersangka penculik dilaporkan mengira sebuah kapal polisi yang tidak bertanda sebagai kapal pukat ikan yang dapat mereka bajak. Para penculik telah membajak dua kapal lain malam itu, dan salah satu dari dua korban penculikan, kapten kapal pukat ikan, diselamatkan setelah baku tembak. Ini adalah pertama kalinya pasukan keamanan Malaysia melibatkan penculik di daerah tersebut.
- Pada 15 November 2016, warga negara Malaysia Hasan Zakaria, 25, dilaporkan mengendarai bom mobil ke sekelompok tentara Kurdi di Suriah, menewaskan 15 orang, termasuk dirinya sendiri, dan melukai banyak lainnya

2. Pada tahun 2017

- Pada 13 Januari 2017, tiga militan ISIS Malaysia dilaporkan tewas dalam serangan udara di Raqqa, Suriah. Salah satu dari mereka yang tewas, Zainuri Kamaruddin, muncul dalam

video pada Mei 2016 membakar paspor Malaysia-nya dan berjanji setia kepada ISIS.⁸⁴

3. Pada tahun 2018

- Pada pemilihan umum Mei 2018, seorang ibu rumah tangga berusia 51 tahun berencana menggunakan mobil berisi tabung gas dan bahan peledak untuk memotong pemilih di tempat pemungutan suara, meningkatkan pelaku wanita membunuh tidak hanya dengan keluarga mereka, tetapi juga melakukan "self-directed" atau "lone wolf" teroris bertindak sendiri.⁸⁵

4. Pada tahun 2019

- Meskipun tidak ada serangan yang berafiliasi dengan ISIS yang dilakukan pada tahun 2019, Malaysia tetap menjadi titik transit dan pusat kegiatan penculikan untuk tebusan yang dilakukan oleh jaringan teroris lainnya. Pada 18 Juni, 10 nelayan diculik di lepas pantai Lahad Datu di negara bagian Sabah oleh militan ASG. Para korban kemudian diselamatkan dan dibebaskan tanpa membahayakan. Pada 4 September, dua pria bersenjata yang diyakini sedang mencari calon korban penculikan atau dengan rencana untuk melakukan tindakan kekerasan dibunuh oleh polisi setempat di perairan Sabah.

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Mustafa, Muzliza and Zam Yusa. "Malaysia's New Terror Threat: Women Acting as 'Lone-Wolf' Operatives.", Benar News, July 24, 2018. Diakses pada 26 Juli 2022
<https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/womenterror-07242018160131.html>.

Komando Keamanan Sabah Timur (dikenal sebagai ESSCOM) mengumumkan bahwa komisi keamanan itu "siaga tinggi" setelah penculikan tiga nelayan Indonesia pada 23 September dan mengetahui bahwa pemberontak ASG berencana melakukan penggerebekan untuk korban tebusan di daerah Sabah Timur.⁸⁶

5. Pada tahun 2020

- Masih menjadi titik transit dan pusat kejahatan penculikan untuk tebusan, pada 16 Januari, lima nelayan Indonesia diculik di lepas pantai Lahad Datu di negara bagian Sabah oleh militan ASG.⁸⁷

6. Pada tahun 2021

- Pihak berwenang melakukan sekitar 15 penangkapan di Sabah antara Mei dan September. Ada tujuh penangkapan pada tahun 2020. Analisis menyatakan bahwa ancaman teror telah pindah secara online terkait dengan Covid-19.

4.2.5 Indonesia

Kondisi geografis dan alam Indonesia berpotensi terjadinya pemberontakan perkembangan. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat strategis penting dalam lingkup regional dan global; meski berbagai ancaman pemberontakan yang selalu memberikan tekanan dan

⁸⁶ Counter Extremism Project, *Op. Cit.*

⁸⁷ State Government, Country Reports on Terrorism 2020: Malaysia, diakses pada 26 Juli 2022
<https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/malaysia/>

kontradiksi politik yang kuat. Keberagaman suku, agama, ras, dan kelompok merupakan faktor yang mempersatukan ketahanan nasional, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.⁸⁸

Menurut dari motivasi dan bentuk terorisme di Indonesia maka dibedakan menjadi 3 yaitu:⁸⁹

1. Gerakan Revolusioner, gerakan ini memiliki tujuan untuk mengubah atau mengadakan perubahan dalam tatanan ekonomi hingga politik.
2. Gerakan ethno-nasionalis, biasanya gerakan ini berbentuk separatis yang dimana tujuan kelompok ini untuk mendirikan negara terpisah dari Indonesia.
3. Religious terrorism, gerakan atau kelompok ini menggunakan agama sebagai ideologi dan tujuan perjuang kelompok mereka. Bentuk terorisme ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri terpisah yang menggunakan prinsip-prinsip dan ajaran agama sebagai aturan dan landasan hukum hidup bermasyarakat.

Meski rezim politik Indonesia sudah cukup stabil, masuknya ISIS di Indonesia diyakini memanfaatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Pemerintah Indonesia telah secara aktif memerangi radikalisme dan

⁸⁸ Putu Sastra Wingarta, Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika (Pendekatan Kewaspadaan Nasional) Jurnal Edisi 26, 2016, hlm.18-19

⁸⁹ Buku Perkembangan Terorisme di Indonesia, diakses pada 6 Agustus 2022, hlm.14
<http://repository.uki.ac.id/432/1/Buku%20Perkembangan%20Terorisme%20di%20Indonesi.pdf>

terorisme, dan secara umum telah mencapai keberhasilan dalam memerangi dan memerangi terorisme. Penegak hukum juga sangat aktif dalam menggunakan undang-undang keamanan domestik yang ada, yang memberikan kekuatan yang lebih luas untuk memerangi terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Peristiwa pemberontakan di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini banyak mendapat perhatian karena diduga memiliki hubungan dengan ISIS dan terorisme internasional lainnya organisasi. Indonesia bahkan sangat ketat dalam mengawasi dan memperketat pengawasan transaksi keuangan internasional untuk mencegah pendanaan ISIS.

Kasus insiden di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2021:

1. Insiden terorisme tahun 2016:⁹⁰

- Pada 14 Januari, empat pria menyerang pos polisi dan kedai kopi waralaba AS dengan senjata ringan dan bom rakitan di Jakarta Pusat. Tiga warga negara Indonesia dan seorang warga negara ganda Aljazair-Kanada tewas dan sedikitnya 23 lainnya luka-luka. Pemimpin JAD yang dipenjara Aman Abdurahman diyakini telah merencanakan serangan dengan bantuan dari pengebom Kedutaan Besar Australia tahun 2004

⁹⁰ U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. 2016 Country Reports on Terrorism: Indonesia. 2016, diakses pada 26 Juli 2022 <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/country-reports-terrorism-2016/>

yang dipenjara Iwan Darmawan (alias Rois) dan pejuang ISIS Indonesia yang berbasis di Suriah ² Abu Jandal.

- Pada tanggal 5 Juli, Nur Rohman, seorang pelaku bom bunuh diri yang memiliki hubungan dengan JAD, menyerang sebuah kantor polisi di Solo, Jawa Tengah, membunuh dirinya sendiri dan melukai seorang polisi.
- Pada ² 27 Agustus, seorang remaja berusia 17 tahun menyerang seorang imam Katolik dengan pisau, menyebabkan luka ringan, setelah gagal meledakkan bom rakitan di sebuah gereja di Medan, Sumatera Utara. Polisi menangkap penyerang, yang diradikalisasi secara online dan bersimpati dengan ISIS.
- Pada tanggal 20 Oktober, Sultan Azianzah menyerang tiga polisi dengan pisau, di Tangerang, Jawa Barat. Polisi menembak dan membunuh Azianzah, yang terkait dengan JAD, selama serangan itu.
- Pada ² 13 November, mantan tahanan teroris Johanda melemparkan bom molotov ke Gereja Oikumene di Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur, melukai empat anak dan merusak beberapa sepeda motor. Polisi menangkap Johanda, yang merupakan bagian dari sel JAD.

2. Insiden terorisme tahun 2017:⁹¹

- JAD menargetkan polisi sepanjang tahun, termasuk 24 Mei, ketika dua pembom bunuh diri JAD secara fatal meledakkan bom bertekanan di sebuah terminal bus di Jakarta Timur yang menewaskan tiga petugas polisi dan melukai tujuh warga sipil. Polisi menjadi sasaran beberapa serangan terkait JAD lainnya, termasuk penikaman pada 25 Juni di sebuah pos polisi di Sumatera Utara yang menewaskan satu petugas polisi dan melukai lainnya, serta penusukan pada 30 Juni di sebuah masjid di Jakarta yang melukai dua petugas polisi.

3. Insiden terorisme tahun 2018:⁹²

- Pada 14 Mei 2018, terjadi ledakan di pos pengamanan Mapolres Surabaya, Jawa Timur yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan korban jiwa.
- Pada tanggal 13 Mei 2018, terjadi ledakan di tiga gereja di Surabaya yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan jiwa

4. Insiden terorisme tahun 2019:⁹³

⁹¹ U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, *2017 Country Reports on Terrorism: Indonesia*, 2017, diakses pada 18 Juli 2022 .<https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2017-country-reports-on-terrorism>

⁹² GOV.UK. (n.d). *Foreign travel advice: Indonesia Terrorism*, diakses pada 18 Juli 2022 <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia/terrorism>

⁹³ U.S. Department of State. *Country Reports on Terrorism 2019: Indonesia*. 18 Juli 2022 <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/indonesia/> diakses pada

- Pada 12 Maret, istri seorang tersangka teroris meledakkan bom, membunuh dirinya dan anaknya setelah menolak menyerahkan diri kepada polisi di Sibolga.
 - Pada 10 Oktober, dua penyerang yang diilhami ISIS, sepasang suami istri, melukai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan seorang polisi dalam serangan penusukan di Pandeglang.
 - Pada 13 November, seorang anggota sel JAD berusia 24 tahun yang menyamar sebagai sopir ojek meledakkan rompi bom di kompleks markas polisi di Medan, menewaskan dirinya sendiri dan melukai empat personel polisi dan dua warga sipil.
5. Insiden terorisme tahun 2020: Kelompok dan aktor yang terinspirasi ISIS terus menargetkan warga sipil dan penegak hukum:⁹⁴
- Pada bulan April, MIT membunuh dua warga sipil di Poso.
 - Pada bulan Juni, seorang pendukung ISIS yang menggunakan pedang membunuh seorang polisi Indonesia di distrik Daha Selatan, Kalimantan.
 - Pada 27 November, anggota MIT membunuh empat warga sipil di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.
6. Insiden Terorisme di Indonesia 2021:

⁹⁴ U.S. Department of State. *Country Reports on Terrorism 2020: Indonesia*. 2020, diakses pada 18 Juli 2022 <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/indonesia/>

- Berdasarkan data Densus 88, pada Januari sebanyak 29 orang terduga teroris ditahkap. Kemudian Februari 24 orang; Maret, 75 orang; April, 70 orang; Mei 17 orang; Juni 25 orang; Juli 8 orang; Agustus 61 orang; September 7 orang; Oktober 1 orang; November 17 orang; dan Desember 36 orang. Total tersangka teroris ditangkap pada 2021 sebanyak 370 orang.⁹⁵
- 28 Maret 2021 sekitar pukul 10.28 WIB. Bom bunuh diri meledak di depan Gereja Katedral di Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi teror ini menewaskan 2 orang yang merupakan pelaku bom bunuh diri.
- 31 Maret 2021. Teroris bernama Zakiah Aini (ZA), 25, melakukan aksi penembakan di dalam kompleks Mabes Polri, tepatnya di pos penjagaan gerbang utama.
- 11-12 Mei 2021. Teroris dari Mujahidin Indonesia Timur telah membunuh empat petani Kristen termasuk seorang Katolik di Kabupaten Poso Indonesia di provinsi Sulawesi Tengah. Mereka dibunuh saat sedang bekerja di perkebunan kopi di desa Kalimago pada pukul 08.25 pada 11 Mei. Keempat korban hanya diketahui berinisial MS, S, P dan L. Pemakaman mereka berlangsung pada 12 Mei.

⁹⁵ Wilda Hayatun Nufus. "370 Teroris Ditangkap Sepanjang 2021, Terbanyak dari Kelompok JI" diakses pada 18 Juli 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5868563/370-teroris-ditangkap-sepanjang-2021-terbanyak-dari-kelompok-ji>)

- 18 September 2021. Polri melalui Satgas Madago Raya terlibat kontak senjata dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Peristiwa terjadi di Pegunungan Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sekitar pukul 17.20 WITA.

7. Insiden Terorisme di Indonesia 2022:

- Densus 88 Anti-Terror Polri Irjen Marthinus Hukom menyatakan, sepanjang tahun 2022 atau tepatnya hingga Maret, Densus 88 telah menangkap 56 teroris.⁹⁶
- 16 Juli 2022. Sekitar 20 pria bersenjata menyerang desa Nogolait, Dataran Tinggi Papua. 10 orang ditembak mati dan dua lainnya terluka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat diduga berada di balik serangan itu.

4.3 Profil Kelompok NII (Negara Islam Indonesia)

Kelompok NII berawal dari gerakan DI/TII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo lalu diikuti oleh Kahar Muzakkar dan Daud Beureuh. Lalu pada tahun 1970-an hingga 1980-an muncul gerakan komando Jihad yang kemudian berkembang dan berubah menjadi gerakan terror dan kekerasan pada masa pasca reformasi. Dengan adanya gerakan gerakan ekstremis berbasis kekerasan ini berkembang menjadi

⁹⁶ Ardito Ramadhan. "Sudah Tangkap 56 Teroris hingga Maret 2022, Densus 88: Terorisme Masih Ada" (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/21/17030661/sudah-tangkap-56-teroris-hingga-maret-2022-densus-88-terorisme-masih-ada> diakses pada 18 Juli 2022).

islam radikal yang baru yang dimana kelompok ini akhirnya dipengaruhi oleh gerakan radikal lainnya di timur tengah.⁹⁷

Kelompok Negara Islam ini pada saat Orde Baru di Indonesia diwakili oleh berbagai kelompok dan faksi, tetapi mereka berasal dari gerakan tunggal yang disebut Darul Islam (DI). Pada tahun 1949, kelompok ini mendeklarasikan dirinya sendiri untuk berdirinya Negara Islam Indonesia di desa Cisampah kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan tujuan tunggal untuk menolak kebijakan Republik Indonesia untuk menarik pasukan mereka dari Barat Jawa. Kelompok DI beroperasi di Jawa Barat dan meluaskan pengaruhnya ideologi ekstremis dan kekerasannya di Sulawesi Selatan dan Aceh. Meskipun pemberontakan Darul Islam sudah ditumpas total oleh negara, banyak gerakan yang terkait dengan DI masih terlihat dan beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Kelompok-kelompok yang saat ini terkait dengan Darul Islam telah diduga terlibat dalam kegiatan teroris di Indonesia. Bahkan orang-orang yang telah bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) masih memiliki hubungan dengan pemberontakan Darul Islam di masa lalu.⁹⁸

Munculnya Negara Islam Irak dan Suriah (IS) pada 2014 melihat dan merekrut berbagai jaringan militan Indonesia, dimana jaringan ini berjanji setia kepada pemimpinnya Abu Bakar al-Baghdadi. Sementara kelompok jihadis Indonesia terbesar, Jemaah Islamiyah, tetap setia kepada sekutu tradisionalnya di Al-Qaeda dan Jabhat al-Nusra (kemudian Hay'at Tahrir al-Sham), koalisi pro-ISIS yang

⁹⁷ M. Zaki Mubarak, DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontempore, Vol. 10 No. 1, 2015, hlm. 80-81

⁹⁸ M. Hasan Syamsudin, Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) ((Studi Kasus Bom Bali I), Jurnal Pemikiran Politik Islam, 2021, hlm. 3-4

longgar dibentuk di bawah Jamaah Anshorul Daulah (JAD). Cepat keuntungan teritorial ISIS di Suriah dan Irak sangat memberi energi kepada Indonesia jihadisme, menarik pemuda radikal dan militan veteran. Mantan pemimpin Jihadis Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, mengejutkan para pengamat dengan mengalihkan kesetiaan kepada ISIS dari sel penjaranya. Para pengikutnya pun secara terbuka mengadakan sumpah kesetiaan kelompok di masjid-masjid terkemuka dan berbaris dengan bendera hitam di jalanan Jakarta.⁹⁹

Apa yang tidak dimiliki gerakan "Negara Islam" dalam hal organisasi struktur di Indonesia itu diperoleh dalam kemampuan untuk mengejutkan pihak berwenang dengan serangan skala kecil hingga menengah yang berulang. Di era ISIS, yang paling banyak serangan yang menonjol di Indonesia adalah pengeboman dan penembakan terhadap Starbucks dan pusat perbelanjaan di pusat kota Jakarta pada Januari 2016, beberapa bom bunuh diri yang dipimpin keluarga terhadap target gereja dan polisi di Surabaya pada Mei 2018, dan serangan pisau terhadap kepala keamanan Indonesia menteri, Wiranto, pada Oktober 2019. Insiden ini menewaskan lebih dari dua puluh orang dan puluhan lainnya terluka.¹⁰⁰

Contohnya ada 30 orang dari Lampung yang terpapar oleh ideologi NII. Diperkirakan ada 30% mahasiswa di Lampung yang juga sudah terpapar atau terjangkit ideologi NII. Adapun di Sumatera, yang diketahui ada 15 orang terpapar

⁹⁹ Quinton Temby. "Terrorism in Indonesia after "Islamic State"". Singapore: ISEAS Publishing, 2020

¹⁰⁰ *Ibid*

NII. Namun di perkirakan mencapai ribuan yang sudah terpapar.¹⁰¹ Maka dari sini kelompok ini mengambil ide ide radikal dan ekstrim dan mereka memulai untuk menggunakan kekerasan untuk memajukan atau menuju tujuannya sehingga kelompok ini menjadi kelompok yang akan mengganggu stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan negara Indonesia.

4.4 Sejarah Kebijakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di ASEAN

Isu terorisme telah berkembang dalam kompleksitas dan menimbulkan lebih banyak ancaman bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk ASEAN. Kemajuan internet dan media sosial telah menghasilkan jaringan luas kelompok global dan regional serta pola radikalisasi baru. Munculnya teroris tunggal dan kelompok regional yang berjanji setia kepada Daesh/Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) serta kembalinya pejuang teroris asing (FTF) tetap menjadi perhatian utama bagi ASEAN.

Dalam skala global, konsep violent extremism telah masuk dalam Resolusi 2178 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang mengkategorikan kedua konsep tersebut atas kaitannya dengan terorisme, serta mendorong negara anggota PBB untuk merumuskan strategi dalam berbagai tingkat dalam ranah menghadapi radikalisasi dan violent extremism. ASEAN didirikan sebagai komunitas keamanan yang dilengkapi dengan norma-norma non-interferensi dan kedaulatan, namun masih ada komitmen terhadap institusi.

¹⁰¹ Fathiyah Wardah, BNPT: NII Induk Semua Gerakan Terorisme di Indonesia, diakses pada 27 Juli 2022 <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-nii-induk-semua-gerakan-terorisme-di-indonesia/6522808.html>

Pencapaian utama ASEAN adalah memastikan perdamaian dan stabilitas di antara para anggotanya dan posisinya di pusat badan keamanan regional. Keharusan stabilitas itu tetap penting meskipun ASEAN terkendala oleh perpecahan internal di antara para anggotanya. Selain itu, beberapa konsep normatif regionalisme Asia telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam kawasan Asia Tenggara, ASEAN telah menggagas beberapa inisiatif untuk menanggapi radikalisasi dan ekstrimisme yang didasari pada prinsip ASEAN Charter dan ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025. Pada tahun 2015, ASEAN menggagas nilai ‘moderasi’ untuk menghadapi radikalisasi dan ekstrimisme melalui Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates. Selain itu, pada tahun 2017, ASEAN mengadopsi ¹ **Manila Declaration to Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism** beserta rencana aksinya yang kembali menegaskan radikalisasi dan violent extremism sebagai ancaman keamanan kawasan, dan menggambarkan areas of cooperation dalam upaya melawan radikalisasi dan violent extremism di Asia Tenggara.

Pendekatan ASEAN dalam isu keamanan ini menarik untuk diteliti. Kebijakan ASEAN terhadap diskursus radikalisasi, dan violent extremism, serta output kebijakan yang terkait dapat menjelaskan definisi radikalisme dan violent extremism yang unik pada kawasan Asia Tenggara. Secara metodologis, sekuritisasi umumnya dilakukan dalam arena demokrasi yang terdiri atas supra dan

infrastruktur politik yang menciptakan pola hubungan vertikal antara securitizing actor sebagai the ruling elite dan audience sebagai the ruled class.¹⁰²

Dalam konteks ASEAN, baik securitizing actor maupun audience berada dalam suatu struktur komunitas keamanan yang sama.¹⁰³ Secara komunitas, prinsip non-interference ASEAN menuntut negara anggota untuk tidak mencampuri urusan domestik sesama anggota, dan sistem pengambilan keputusan “ASEAN Way” dilandaskan pada mekanisme konsultasi dan consensus. Di sisi lain, isu keamanan secara mendasar mengandung unsur sensitif terhadap keamanan nasional, serta sarat akan kepentingan nasional yang bersifat sensitive dan penuh dengan interpretasi subjektif masing-masing negara.¹⁰⁴

4.4.1 Isi Kebijakan ASEAN Ekstremisme Kekerasan Tahun 2019-2025

Berdasarkan The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2018 – 2025) yang diadopsi di Myanmar, 31 Oktober 2018:

1. Lawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya yang mengarah pada terorisme, termasuk mencegah radikalisasi, pembiayaan, perekrutan dan mobilisasi individu ke dalam kelompok teroris;
2. Menekankan kuat pada aspek deradikalisasi dalam rehabilitasi dan reintegrasi program sebagai bagian dari langkah komprehensif dalam

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ralf Emmers, “ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia”, 2010, diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951274032000085653>

¹⁰⁴ Paul D. Williams. *Security Studies An Introduction*. Oxfordshire: Routledge, 2008

penanggulangan terorisme, selain menerapkan tindakan kekerasan atau hukuman, untuk memastikan bahwa individu yang radikal atau ekstremis siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat serta untuk mencegah 'kambuh' atau kembalinya mereka ke militan/teroris kegiatan;

3. Melakukan analisis dan kajian terhadap faktor-faktor, termasuk akar penyebabnya, yang menciptakan situasi kondusif lingkungan bagi penyebaran radikalisasi dan ekstremisme kekerasan di Asia Tenggara dengan pandangan untuk membantu Negara-negara Anggota ASEAN dengan memberikan mereka pemahaman yang lebih baik untuk secara efektif mengatasi kedua masalah yang dapat mengarah pada terorisme;
4. Kembangkan program untuk melawan ekstremisme kekerasan yang membangun kepercayaan dan memperkuat kerja sama antara masyarakat rentan radikalisasi dengan Polri. Inisiatif ini mungkin focus pada hubungan masyarakat-polisi seperti melalui pemolisian masyarakat. Selain itu, ASEAN Negara-negara Anggota juga harus mengembangkan lebih banyak pendekatan berbasis komunitas untuk melawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan; dan
5. Mengembangkan dan mengimplementasikan, bersama dengan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan, kampanye komunikasi regional untuk melawan narasi teroris melalui semua informasi dan teknologi komunikasi yang ditujukan untuk menolak para pendukung radikal dan ekstremis dan peluang untuk mengejar kegiatan ekstremis/teroris dan mempromosikan ideologi yang benar.

Rencana kerja ini dimaksud agar bisa menjadi kerangka kerja komprehensif dan cukup luas untuk dapat di terapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara ASEAN. Rencana kerja ini juga mengakomodasi kegiatan yang akan disesuaikan dengan faktor lokal dan konteks spesifik yang dapat berkontribusi pada masalah ekstremisme kekerasan. Nilai-nilai rencana kerja ini harus berbasis bukti, didorong oleh data, dan ditujukan untuk menjangkau berbagai sektor, dengan fokus khusus pada populasi atau demografi yang rentan terhadap radikalisasi.

4.5 Upaya Indonesia dalam Melawan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Menuju Pada Terorisme

Indonesia menggunakan pendekatan berbasis aturan hukum yang dipimpin oleh penegakan hukum sipil dalam operasi kontraterorisme domestiknya. Maka Indonesia berusaha berkerjasama agar bisa membuat basis kebijakan Ekstremisme berbasis kekerasan yang baik. Sejak Bom Bali tahun 2002, Indonesia telah menerapkan tekanan berkelanjutan untuk menurunkan kemampuan teroris dan jaringannya yang beroperasi di dalam perbatasan Indonesia.¹⁰⁵ Indonesia selalu berkomitmen terhadap upaya penanggulangan terorisme, termasuk antara lain upaya pemberantasan terorisme di bawah kerangka PBB. Maka, Indonesia berperan aktif bekerjasama dengan United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-United Nations Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan United Nations Counter-Terrorism Executive Director

¹⁰⁵ Mohammad Hasan Ansori Imron Rasyid , MEMBERANTAS TERORISME DI INDONESIA: PRAKTIK, KEBIJAKAN DAN TANTANGAN, Jakarta: THC , 2019, diakses pada 9 Agustus 2022
<https://www.habibiecenter.or.id/img/publication/32214d4ad76cedc4d9f34f382b30d2ed.pdf>

(UNCTED). Selanjutnya, Indonesia melakukan upaya untuk mengimplementasikan 4 (empat) pilar United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS).¹⁰⁶

Indonesia sangat aktif dalam berpartisipasi dalam Global Counter-Terrorism Forum (GCTF), terutama sebagai co-chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group (SEAWG), yang dimana Indonesia berkerjasama dengan Australia pada tahun 2013. Selain itu Indonesia dan Australia juga membentuk Kelompok Kerja Penahanan dan Reintegrasi (DRWG). Pembentukan kelompok kerja ini diprakarsai oleh Indonesia dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan yang menangani pengelolaan pelaku kekerasan ekstremis di penjara, dan menjawab kebutuhan untuk bertukar informasi dan praktik baik terkait.¹⁰⁷

Di tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi penanggulangan terorisme komprehensif yang memadukan pendekatan keras dan lunak. Terkait dengan pendekatan keras tersebut, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat upaya pendanaan kontraterorisme, Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Perusahaan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris serta Pemblokiran Bersama Merta atas Barang Milik Orang atau Perusahaan yang Terdaftar dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris.

¹⁰⁶ Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme, diakses pada 10 Agustus 2022 https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme

¹⁰⁷ *Ibid*

Beberapa serangan skala kecil atau percobaan serangan oleh ²ekstremis pro-ISIS terjadi sepanjang tahun 2016 di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan diatas. Polisi terus mendeteksi dan mengacaukan beberapa plot teroris, termasuk plot ²untuk mengebom istana presiden pada bulan Desember yang terkait dengan teroris Indonesia yang berperang melawan ISIS. Tidak hanya itu Indonesia juga mempunyai badan nasional untuk menanggulangi terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). BNPT dibentuk pada September 2010 untuk mengoordinasikan mulai dari pengumpulan intelijen hingga upaya pencegahan.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) no. 46 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012 kemudian dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang dalam Pasal 2 ayat 1 mengamanatkan BNPT untuk: Pertama, menyusun kebijakan dan strategi serta program nasional di bidang penanggulangan terorisme. Kedua, mengkoordinasikan instansi terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme, dan ketiga, melaksanakan kebijakan dan strategi di bidang penanggulangan terorisme. Penempatan BNPT sebagai lembaga di bawah presiden juga dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar kementerian/lembaga/lembaga pemerintah dalam penanggulangan terorisme dan sekaligus melibatkan peran serta masyarakat. Kebijakan penanggulangan terorisme juga diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

² BNPT menggunakan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme tingkat provinsi yang terdiri dari tokoh masyarakat dan agama untuk mengembangkan dan mengoordinasikan program terkait CVE di dalam komunitas mereka. BNPT juga bekerjasama dengan pimpinan mahasiswa untuk mengembangkan konten kontra-narasi, yang disebarluaskan melalui website resmi BNPT dan akun media sosial. Deradikalisasi narapidana² teroris yang dikeluarkan oleh BNPT pada akhir tahun 2013 belum sepenuhnya dilaksanakan pada akhir tahun 2016. Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, BNPT berencana untuk membuka pusat deradikalisasi di Sentul, Jakarta Selatan. Selain itu, BNPT dan polisi melatih petugas humas mereka tentang pendekatan kontra-pesan yang efektif.

4.5.1 Isi Kebijakan Indonesia Ekstremisme Kekerasan

Berdasarkan isi Rencana Aksi Nasional Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme tahun 2020-2024 yaitu Pada Pasal 1 Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut menjelaskan makna Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Pencegahan dan Penanggulangannya, arti dari Terorisme, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Pasal 2 menjelaskan tujuan RAN PE yaitu untuk meningkatkan perlindungan atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pasal 3 menjelaskan pendahuluan dan strategi RAN PE Tahun 2020-2024. Pasal 4 menjelaskan menteri, pemimpin negara, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai

dengan kewenangan dan daerahnya masing-masing. Pasal 5 menjelaskan dengan Perpres ini, dibentuk juga Sekretariat Bersama RAN PE.¹⁰⁸

Selanjutnya, Pasal 6 menjelaskan dalam pelaksanaan Aksi PE, Sekretariat Bersama RAN PE dapat menambah dan/atau melakukan penyesuaian Aksi PE sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pasal 7 menjelaskan tugas dari Sekretariat Bersama RAN PE. Pasal 8 menjelaskan dalam pelaksanaan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah saat bekerja sama dapat melibatkan masyarakat. Pasal 9 menjelaskan rentang waktu periodik perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE. Pasal 10 menjelaskan pertemuan paling sedikit 6 kali dalam mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE, yang dimana cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN PE disusun oleh Sekretariat Bersama RAN PE. Pasal 11 menjelaskan sumber pendanaan RAN PE. Dan, Pasal 12 menjelaskan Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.¹⁰⁹

Tujuan dari RAN PE ini untuk meningkatkan kehadiran negara dalam pemenuhan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimana RAN PE juga memperhatikan prinsip-prinsip

¹⁰⁸ LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020- 2024 diakses pada https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176329/Lampiran_Perpres_Nomor_7_Tahun_2021.pdf

¹⁰⁹ https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176329/Perpres_Nomor_7_Tahun_2021.pdf

7
Hak Asasi Manusia; Supremasi hukum dan keadilan; Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; Keamanan dan keselamatan; Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); Partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta Kebhinekaan dan kearifan lokal.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Penyelarasan Kebijakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Indonesia dengan ASEAN

Pemerintah Indonesia⁵ membuat komitmen politik untuk memerangi terorisme apapun motifnya dan kelompok afiliasinya, serta memobilisasi dukungan sumber daya yang cukup untuk memerangi tindakan terorisme dan membuka diri untuk bekerja sama dengan negara lain dalam memerangi terorisme. Untuk mempublikasikan¹ Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Melawan Ekstremisme Kekerasan dan juga bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum dan peraturan pendukung untuk referensi dalam penanganan ekstremisme kekerasan, dan mengatasi perlunya koordinasi kelembagaan antar kementerian dan lembaga. Seiring dengan berkembangnya kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan dan jika dilihat menggunakan konsep keamanan Barry Buzan, yang dimana negara akan melakukan apa saja agar bisa menjaga keamanannya dalam sistem internasional sehingga negara akan melakukan kerjasama untuk membuat kebijakan untuk menjaga keamanan negaranya.

Sejauh ini undang-undang yang relevan dan regulasi lebih menitik beratkan pada upaya pemberantasan terorisme dalam kerangka hukum hanya menggunakan pendekatan keras. Sedangkan pendekatannya adalah pendekatan lunak untuk meminimalkan Tindakan terorisme di Indonesia tidak ada. Demikian pula, aktor yang terlibat masih terbatas pada kementerian dan lembaga yang secara langsung

memiliki kewenangan dalam aparat penegak hukum dan keamanan, namun belum melibatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama meningkatkan dalam mengatasi kejahatan ekstremisme berbasis kekerasan.

Maka pada bulan Februari 2016 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima rancangan Rencana Aksi PBB untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal dari PBB. Dalam Rencana Aksi, ada tujuh bidang prioritas yang perlu yang akan dibahas dalam Pencegahan/CVE, yaitu (a) Dialog dan Pencegahan Konflik; (b) Memperkuat Tata Pemerintahan yang Baik, Hak Asasi Manusia dan Supremasi Hukum; (c) Melibatkan Komunitas; (d) Pemberdayaan Pemuda; (e) Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (f) Pendidikan, Pengembangan Keterampilan dan Fasilitas Lapangan Kerja; dan (g) Strategis Komunikasi, Internet dan Media Sosial. Tujuh bidang prioritas direkomendasikan untuk Negara-negara anggota PBB untuk dapat menjalankan program CVE.¹¹⁰

Dengan nilai-nilai yang telah dibuat oleh PBB maka ASEAN mengadopsikannya untuk dipergunakan sebagai kebijakannya dalam regional. ASEAN telah secara aktif menanggapi ancaman yang berkembang ini dalam beberapa tahun terakhir, mengumumkan pada 2015 Deklarasi Langkawi tentang Gerakan Global Moderat bahwa dalam mengejar perdamaian jangka panjang dan alat untuk meredakan ketegangan, meniadakan radikalisme, dan melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Ini memperhitungkan bahwa ASEAN akan

¹¹⁰ (UN, 2016)

berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama untuk menanggulangi ancaman ekstremisme.

Dalam Blue Print Politik dan Keamanan ASEAN (2015-2025) menetapkan visi untuk komunitas yang dapat menghormati sepenuhnya perbedaan agama, budaya, dan bahasa kita bangsa, menjunjung tinggi nilai-nilai bersama dalam semangat serta menyikapi ancaman ekstremisme kekerasan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Deklarasi Manila 2017 juga memperkenalkan jalur upaya khusus untuk Negara Anggota ASEAN, seperti mengambil langkah-langkah untuk (1) mencegah adikalisasi, pembiayaan, rekrutmen, dan mobilisasi individu ke dalam kelompok teroris, (2) mempertimbangkan untuk mengejar deradikalisasi dalam program rehabilitasi dan reintegrasi sebagai alternatif untuk tindakan hukuman, dan (3) melakukan program pengembangan kapasitas untuk mendidik pemuda dan populasi rentan lainnya tentang pentingnya moderasi dan perdamaian resolusi konflik.

Deklarasi Manila, mendesak dalam seruannya untuk negara anggota ASEAN untuk ikut munculnya dan membuat Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Melawan Munculnya Radikalisasi dan Kekerasan Ekstremisme (ASEAN PoA PCRVE), diadopsi pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-12 tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) pada 31 Oktober 2018. ASEAN PoA PCRVE memetakan arah tindakan di antara lembaga-lembaga ASEAN dan untuk lebih memperkuat kerja sama yang erat di antara Negara-negara Anggota dalam mencegah dan melawan munculnya radikalisi dan kekerasan ekstremisme.

Pada November 2019, Indonesia menjadi *prime mover* dalam persiapan menuju regional Rencana Kerja Bali tentang PCVE, disahkan oleh ASEAN. Agar dapat menangkal jaringan ekstremisme berbasis kekerasan maka di tingkat negara bagian di Indonesia telah melakukan upaya serius merumuskan kerangka kebijakan nasional untuk melawan ekstremisme kekerasan yang disebut “Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme” (RAN PE)/Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme (NAP P/CVE) yang mengarah pada Terorisme. Rencana aksi ini terdiri dari tiga pilar yaitu:

- (i) pencegahan;
- (ii) ¹ penegakan hukum dan penguatan kerangka legislatif; dan
- (iii) membangun kemitraan dan memperkuat kerjasama internasional.

Sejak tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai penyusunan RAN PE. Oleh karena itu, P/CVE, fase pertama Proyek PROTECT memberikan dukungan yang luas untuk percepatan penerbitan RAN P/CVE melalui beberapa kegiatan. Desember 2019, BNPT berhasil menyerahkan draft final Perpres mengenai RAN P/CVE ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diproses lebih lanjut dari penerbitannya.

⁸ Lalu dibuat kembali RAN PE merupakan peraturan turunan dari UU No. 5 Tahun 2018, revisi UU tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bab 7A UU tersebut membahas pencegahan, yang terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Kesiapsiagaan

meliputi kesiapan negara untuk mengantisipasi aksi terorisme. Kontra-radikalisasi berarti upaya sistematis, terencana dan terpadu untuk mencegah mereka yang mungkin terkena radikalisme.

Rencana Aksi Nasional Indonesia Mengenai Penanggulangan Kekerasan Ekstremisme yang Mengarah pada Terorisme (RAN CVE) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 setelah tiga tahun pembangunan. Tujuannya untuk mencegah munculnya potensi kekerasan ekstrem yang mengarah pada terorisme. Dalam lampiran 113 halaman Perpres 7/2021, RAN CVE berupaya:

- Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme;
- Meningkatkan partisipasi dan sinergi dalam pelaksanaan program RAN CVE yang dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan pihak/stakeholder lainnya;
- Mengembangkan sistem instrumen pengumpulan dan pemantauan data untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme; dan
- Meningkatkan kerja sama internasional, melalui kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Terkait dengan pendekatan lunak, Indonesia melakukan program deradikalisasi dan kontra radikalisasi. Sehubungan dengan itu, Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme telah meluncurkan Cetak Biru Deradikalisasi dan mendirikan Pusat Deradikalisasi bagi narapidana teroris. Deradikalisasi adalah

kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan radikalisme dari mereka yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme. Merujuk pada dokumen Blueprint, program deradikalisasi meliputi rehabilitasi, reintegrasi dan reedukasi bagi narapidana teroris dengan memberdayakan tokoh agama dan psikolog untuk memberikan kontra-narasi.

5.2 Tujuan Keamanan Dari Penyelarasan Kebijakan Ekstremisme

Berbasis Kekerasan Indonesia dengan ASEAN

Dalam konteks wilayah ASEAN atau Asia Tenggara dengan salah satu negara mengadopsi nilai-nilai rencana kerja ASEAN seperti Indonesia dapat memperkuat kapasitas negara di Asia Tenggara sebagai pemegang kebijakana PVE, yang dimana dapat menanggulangi dan melawan adanya ekstrimisme berbasis kekerasan dengan membuat rencana aksi nasionalnya sendiri. Rencana aksi nasionalnya ini termasuk pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah, CSO, organisasi keagamaan, dan akademisi dalam mencegah dan melawan ekstremisme berbasis kekerasan melalui tiga pendekatan; memberikan dukungan advokasi kebijakan untuk melaksanakan RAN PVE, memperkuat jaringan pelaku PVE di tanah air dan berbasis bukti pengetahuan tentang PVE, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan pemuda, keagamaan organisasi, dan perempuan terhadap narasi ekstremis dan proses radikalisasi.

Tidak hanya itu tujuan lainnya dalam mengatasi keamanan ASEAN dengan dilihat menggunakan Konsep Keamanan Komunitas ialah dapat memperkuat mekanisme yang ada untuk menangani terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan termasuk melalui pelaksanaan dialog regional reguler seperti melalui focal

point lembaga penegak hukum terkait untuk berbagi analisis, faktor, akar penyebab, dan risiko pengkajian dalam rangka penguatan upaya penanggulangan terorisme nasional dan regional dan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan Mitra Dialog ASEAN, organisasi internasional terkait dan pemangku kepentingan lainnya melalui pertukaran pengalaman, pembelajaran dan yang terbaik praktik dalam mengatasi radikalisasi dan ekstremisme kekerasan.

Selain itu adanya memperkuat kerja sama yang erat di antara Negara-negara Anggota ASEAN dapat bertujuan untuk mencegah dan melawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara secara efektif dan efisien, lalu meningkatkan upaya Negara Anggota ASEAN untuk mencegah dan melawan radikalisasi dan kekerasan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, termasuk peningkatan kapasitas untuk penegakan hukum, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, termasuk berbagi informasi dan intelijen, dan mempertimbangkan Rencana Aksi saat ini ketika Negara-negara Anggota ASEAN mulai membangun Rencana Aksi nasional/domestik untuk mencegah dan melawan radikalisasi dan ekstremisme kekerasan di negaranya masing-masing.

Dalam konteks Indonesia, proses penyusunan RAN-PE bersifat partisipatif, dengan masukan yang berarti dari organisasi masyarakat. Aktivis dan akademisi dari semua gender dapat juga berkontribusi pada berbagai aspek substantif dalam RAN-PE, termasuk penguatan dimensi gender, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan kebijakan yang tidak bias terhadap kelompok masyarakat, serta penguatan literasi digital untuk melawan narasi online yang penuh kebencian.

Proses perumusan ini menunjukkan bagaimana pencegahan ekstremisme telah menjadi masalah bagi banyak aspek masyarakat, bukan hanya pemerintah. Misalnya, teroris memikat wanita dan pemuda menggunakan pesan online, yang membutuhkan respons kebijakan pencegahan yang berorientasi pada tindakan. Selain itu, tren meningkatnya pelaku teroris perempuan telah menantang pendekatan keamanan tradisional. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengundang partisipasi berbagai pemangku kepentingan yang inklusif untuk merumuskan strategi pencegahan yang terintegrasi.

Dinamika perkembangan terorisme saat ini mengekspos pemerintah pada kekerasan yang kompleks tantangan ekstremisme, yang membutuhkan inisiatif kreatif, melibatkan semua pemangku kepentingan dan berisi tanggapan kontekstual. Program Rencana Aksi Nasional untuk Mencegah dan Melawan Ekstremisme Kekerasan yang efektif perlu dirancang untuk mengatasi berbagai faktor yang mendorong ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Indonesia telah menerapkan inisiatif melawan ekstremisme kekerasan untuk mencegah dan melawan terorisme. Inisiatif RAN PE di Indonesia diperlukan untuk mengatasi faktor pendorong dan faktor penarik aksi terorisme di Indonesia dan juga sebagai alat untuk mendukung keamanan di ASEAN, yang diidentifikasi dalam pedoman strategi yaitu (1) potensi untuk konflik komunal besar, sering ditopang oleh sentimen primordial dan agama, mengingat keragaman masyarakat Indonesia; (2) ketimpangan ekonomi; (3) perbedaan politik dilihat; (4) perlakuan tidak adil; dan (5) motivasi beragama, termasuk intoleransi kehidupan beragama. Dengan proses koordinasi dan pemantauan evaluasi yang berkesinambungan ini, harapan

pembentukan RAN dapat menyebabkan radikalisme menurun, meningkat program pencegahan di kementerian/lembaga, penguatan antar kementerian/Lembaga koordinasi, peningkatan kemitraan antar kementerian/lembaga/lembaga sipil masyarakat, dan peningkatan partisipasi publik dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah ke terorisme.

5.3 Penanggulangan NII dengan Kebijakan Indonesia dan ASEAN

Peraturan Presiden (perpres) no.7 tahun 2021 RAN-PE dapat mempersempit ekstremisme dan radikalisme di Indonesia. Jika di lihat menggunakan konsep kebijakan CVE maka konsep dan nilai nilai terkandung dalam RAN-PE dapat mencegah dan melawan kelompok NII. Salah satu program yang dipakai untuk menanggulangi NII ialah dengan deradikalisasi. Deradikalisasi menjadi program untuk dapat menetralkan pemikiran karena terpapar radikalisme. Desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan atau upaya, yaitu: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, dan Reintegrasi. Salah satu contoh yang sudah dilakukan pada 29 Mar 2022 yang dimana Densus 88 telah menangkap 16 tersangka teroris jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Tersangka teroris ini akhirnya diberikan program deradikalisasi.

Contoh selanjutnya adalah program deradikalisasi yang telah berhasil yang dimana Densus 88 Bali, telah berhasil membangunkan 48 anggota Jaringan NII Bali dan mengikrarkan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelumnya ada 25 anggota NII telah disadarkan karena program deradikalisasi pada April 2022. Langkah ini dapat mengutamakan pendekatan persuasif untuk menanggulangi potensi ancaman terorisme. Penanggulangan dengan nilai nilai

rencana kerja ASEAN dan Indonesia dapat berhasil dilakukan, sehingga keamanan regional dan keamanan Indonesia dapat dicapai.

BAB VI

KESIMPULAN

Isu ekstremisme berbasis kekerasan semakin terus berkembang dan menjadi salah satu isu keamanan yang patut untuk dibicarakan. Dalam penelitian ini menggunakan 5 negara Asia Tenggara yang rawan dengan adanya kegiatan terorisme, negara-negara ini menjadi contoh bahwa kekerasan berbasis ekstremisme yang menuju pada terorisme sedang meningkat dari tahun ke tahun. Sebelumnya PBB telah membuat kerangka rencana kerja untuk negara-negara di dunia agar bisa mengadopsikannya.

Dari sini ASEAN akhirnya juga membuat rencana aksi sendiri dengan adanya nilai-nilai yang dapat disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara Asia Tenggara. Maka Indonesia yang menjadi salah satu negara yang mempunyai gerakan dan kelompok ekstremisme berbasis kekerasan yang tinggi, Indonesia turut membuat kebijakan rencana aksi Nasionalnya dengan nilai-nilai dari rencana aksi ASEAN dan telah di sahkan menjadi ⁸Perpres No. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN-PE). Kebijakan Indonesia ini dapat berpengaruh dalam menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara, dimana dengan turutannya melakukan penyelarasan dengan ASEAN Indonesia telah berkontribusi pada perdamaian, menjaga keamanan dan stabilitas Kawasan. Semua ini dilakukan agar ekstremisme berbasis kekerasan dapat dicegah dan ditanggulangi. Seperti pada contohnya kelompok NII yang dimana Indonesia mencegahnya sesuai dengan

RAN PE dan Rencana Aksi ASEAN dengan adanya penangkapan berbagai orang atau individu yang sudah terjaring atau terpapar ideologi radikal dan ekstremis lalu diberikan program-program deradikalisasi. Setelah adanya program deradikalisasi, individu ini akan dikembalikan Kembali ke lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adler, E., & Barnett, M. (1998). *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Anak Perwita. (2008) “Dinamika Keamanan Dalam Hubungan Internasional dan Implikasinya Bagi Indonesia”,
https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/344/Orasi_Anak_Agung_Dinamika_Keamanan-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada 19 November 2021
- Anthony, M. C., Emmers, R., & Achary, A. (2009). *Non-traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*, London: Routledge.
- Baylis, J. (2008). *The Concept of Security in International Relations*. Berlin: Springer. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-540-75977-5_37
- Baisagatova , D. B. (2016). “Correlation of concepts "extremism" and "terrorism" in countering the financing of terrorism and extremism. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION* VOL. 11, 5.905-5.906.
- Berger, Peter L. and Thomas Luckmann. (1966). *The Social Construction of Reality*. New York: Penguin Group.
- Bosi, L., & Malthaner, S. (2014). “Political Violence. *Oxford Handbook of Social Movements*, 2.

- Buzan, B. (1983). *People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Michigan: Wheatsheaf Books.
- Center. (n.d.). *Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: The Habibie publication. Retrieved from <http://www.habibiecenter.or.id/img/publication/41d51936208e8c45854498ab7f4e39d3.pdf>
- Creswell, J. (2008). *Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. . Singapore: Pearson Merrill Prentice Hall.
- Holmer, G. (2013). *Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective*. United States Institute of Peace .
- Global Terrorism Index 2020: *Measuring The Impact of Terrorism*, Institute for Economic & Peace. the Institute for Economics & Peace.
- Iskandar. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Jayakumar, S. (2019). *Terrorism Radicalisation & Countering Violent Extremism*,. New York: Routledge.
- Baylis, John. (2008). *The Concept of Security in International Relations*, Berlin: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-540-75977-5_37
- M. Rabasa, A. (n.d.). *The Muslim World After 9/11*. Pittsburgh: Rand Corporation.

- Moleong, L. J. (1999). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Paul D. Williams. (2008) Security Studies An Introduction. Oxfordshire: Routledge
- Quinton Temby. "Terrorism in Indonesia after "Islamic State"". Singapore: ISEAS Publishing, 2020
- Ronnie D. Lipschutz. On Security. Columbia University Press, 1995
- Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: ALFABETA.
- Marcos Degaut, What is Security?,
https://www.researchgate.net/publication/310495076_What_is_Security
 diakses pada 20 November 2021
- Mark Webber, Michael Smith. (2002). Foreign Policy In A Transformed World. London: Routledge
- Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf. (2004). World Politics: Trend and Transformation. United States: Thomson/Wadsworth.
- Georgia Holmer, Countering Violent Extremism: A Peacebuilding Perspective, hlm. 2

Artikel Jurnal

- Adnan, M., & Amaliyah, A. (2021). Radicalism Vs Extremism: The Dilemma Of Islam And Politics In Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 20, 27.
- Ashley L. Rhoades, Todd C. Helmus, Countering Violent Extremism in the Philippines A Snapshot of Current Challenges and Responses, diakses pada 13 Juni 2022 https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA233-2.html
- Chaidar, A., Akmal, M., Ali, S., Amalia, N., Effida, D., & Sahrasad, H. (2018). MASYARAKAT MINDANAO, ABU SAYYAF DAN MASALAH KEAMANAN KAWASAN. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 7(1), 1-44. Retrieved from <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/2098>
- Edyar, B. (2017). Religious Radicalism, Jihad and Terrorism Academic Journal of Islamic Studies. *AJIS Journal*, 2-3.
- Othman, Z. (2013). Non-Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia. *Jurnal Kajian Wilayah* Vol. 4, No. 2, 151-152.
- M. Zaki Mubarak. (2015). DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontempore, Vol. 10 No. 1, 80-81
- P.S., N. (2020). Non-Traditional Security Threat and National Security. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine* Volume 07, 5.899-5.900.
- Porta, D. D. (2018). Radicalization: A Relational Perspective. *Annual Review of Political Science* Vol. 21, 462.

- Nünlist, C. (2015). The Concept of Countering Violent Extremism. CSS Analyses in Security Policy, 1
- ULUSOY, H. (2003). Revisiting Security Communities After The Cold War: The Constructivist Perspective. Jurnal International Affairs Volume 8, Issue 3, 4-5.
- Wahyuni, F. (2019). Causes of Radicalism Based on Terrorism in Aspect of Criminal Law Policy in Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 8, 198.
- Wibisono, S., Louis , W., & Jetten, J. (2019). A Multidimensional Analysis of Religious Extremism. Frontiers in Psychology Vol. 10., 2-3.
- UNDP, Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia, 2020 hlm. 22, diakses pada www.UNDP_EntryandExitPointsViolentExtremisms.pdf
- Wilujeng, N. F. (n.d.). EXAMINING ASEAN OUR EYES DEALING WITH REGIONAL CONTEXT IN COUNTER TERRORISM, RADICALISM, AND VIOLENT EXTREMISM. International Journal of Social Sciences Vol. 6 Issue 1, 268
- United Nation Human Rights Council. (2020). Negative effects of terrorism on the enjoyment of human rights: Study of the Human Rights Council Advisory Committee.
- Putu Sastra Wingarta, Rejuvenasi Bhinneka Tunggal Ika (Pendekatan Kewaspadaan Nasional) Jurnal Edisi 26, 2016, hlm.18-19

M. Hasan Syamsudin, Titik Temu Fundamentalisme. (2021). Radikalisme, dan Terorisme Gerakan Jamaah Islamiyah (JI) ((Studi Kasus Bom Bali I), Jurnal Pemikiran Politik Islam, 3-4

William Stephens. (2021). Preventing Violent Extremism: A Review of the Literature, Studies in Conflict & Terrorism Volume 44, 347

Dokumen Pemerintah

ASEAN. (2018). ASEAN PLAN OF ACTION TO PREVENT AND COUNTER THE RISE OF RADICALISATION AND VIOLENT EXTREMISM (2018-2025). Retrieved from <https://asean.org/storage/2012/05/Adopted-ASEAN-PoA-to-Prevent-and-Counter-PCVE.pdf>

Indonesia. (2018). Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82689/uu-no-5-tahun-2018>

LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020- 2024 diakses pada [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176329/Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176329/Lampiran_Perpres_Nomor_7_Tahun_2021.pdf)

Internet

UNHCR, Country Reports on Terrorism 2016 – Philippines, diakses pada 15 Juni 2022 <https://www.refworld.org/docid/5981e41e13.html>

CNN Indonesia. (2021, Maret 28). Daftar Kasus Ledakan Bom di Indonesia 2 Dekade Terakhir”. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210328150157-20-623072/daftar-kasus-ledakan-bom-di-indonesia-2-dekade-terakhir>

Congressional Research Service. ((2016)). Terrorism in Southeast. Congressional Research Service. Retrieved from https://www.everycrsreport.com/files/20170505_R44501_355e3437898708ad42305150b

Degaut, M. (2015). What is Security? Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/310495076_What_is_Security

Filipina. (2020). Memorandum Order No. 121 years 2020 on Terrorism Particularly on Hostage-Taking. <https://www.officialgazette.gov.ph/2000/10/31/memorandum-order-no-121-s-2000/>

Hidayat, F. (n.d.). Ini 16 kelompok radikal Indonesia yang dibai'at pemimpin ISIS. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-16-kelompok-radikal-indonesia-yang-dibaiat-pemimpin-isis.html>

WAHID Foundation. (2020). Pelembagaan Konsep Ekstremisme Kekerasan dalam Kebijakan Pencegahan Terorisme di Indonesia. WAHID Foundation.

Pusat Studi Asia Tenggara UGM, Konflik Etnik Melayu-Muslim di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, dan Dinamika, 29 Januari 2020, diakses pada <https://pssat.ugm.ac.id/id/konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan-penyebab-proses-dan-dinamika/>

Entry and Exit Points: Violent Extremism in South-East Asia, 20 November 2020 diakses pada <https://www.undp.org/asia-pacific/tolerance-and-diversity/publications/entry-and-exit-points-violent-extremism-south-east-asia>

Counter Extremism, Thailand: Extremism and Terrorism, diakses pada 18 Juli 2022 <https://www.counterextremism.com/countries/thailand-extremism-and-terrorism>

Fathiyah Wardah, BNPT: NII Induk Semua Gerakan Terorisme di Indonesia, diakses pada 27 Juli 2022 <https://www.voaindonesia.com/a/bnpt-nii-induk-semua-gerakan-terorisme-di-indonesia/6522808.html>

Ralf Emmers, "ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia", 2010, diakses pada <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0951274032000085653>

U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. 2016 Country Reports on Terrorism: Indonesia. 2016, diakses pada 26 Juli 2022 <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/country-reports-terrorism-2016/>

U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, 2017 Country Reports on Terrorism: Indonesia, 2017, diakses pada 18 Juli 2022 .<https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2017-country-reports-on-terrorism>

GOV.UK. (n.d). Foreign travel advice: Indonesia Terrorism, diakses pada 18 Juli 2022, <https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/indonesia/terrorism>

U.S. Department of State. Country Reports on Terrorism 2019: Indonesia. 18 Juli 2022 <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/indonesia/>

Wilda Hayatun Nufus. “370 Teroris Ditangkap Sepanjang 2021, Terbanyak dari Kelompok JI” diakses pada 18 Juli 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5868563/370-teroris-ditangkap-sepanjang-2021-terbanyak-dari-kelompok-ji>)

BUREAU OF COUNTERTERRORISM, Country Reports on Terrorism 2020: Malaysia diakses pada 19 Juli 2022, <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2020/malaysia/>

Counter Extremism Project, Malaysia: Extremism and Terrorism, diakses pada 25 Juli 2022 <https://www.counterextremism.com/countries/malaysia-extremism-and-terrorism>

Mustafa, Muzliza and Zam Yusa. “Malaysia’s New Terror Threat: Women Acting as ‘Lone-Wolf’ Operatives.”, Benar News, July 24, 2018. Diakses pada 26 Juli

2022 <https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/womenterror-07242018160131.html>

Refworld, <https://www.refworld.org/docid/5bcf1f7b11.html>

Kementerian Luar Negeri Indoneisia, Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme, diakses pada 10 Agustus 2022
https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme

Skripsi Amanda Dhea Sekharwardhani

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

asiapacific.unwomen.org

Internet Source

1%

2

id.usembassy.gov

Internet Source

1%

3

www.jawapos.com

Internet Source

1%

4

www.kemlu.go.id

Internet Source

1%

5

www.researchgate.net

Internet Source

1%

6

nanopdf.com

Internet Source

1%

7

www.tomatalikuang.com

Internet Source

1%

8

wahidfoundation.org

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%